



● TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 ●

# info indonesia

MINGGU | FEBRUARI 2024

HARGA, @RP 20.000,-



Road to  
Election  
2024



▶ **PRABOWO**  
**LEBIH TENANG**  
**YAKIN BISA**  
**MENANG**

▶ **ANIES**  
**PILIH**  
**MAIN**  
**MANIS**

▶ **GANJAR**  
**BIKIN**  
**PENDUKUNG**  
**SENANG**

▶ **ANIES UNGGUL**  
**DEBAT GANJAR -**  
**PRABOWO**  
**KETAT**

▶ **NETRALITAS**  
**TITO**  
**KARNAVIAN**  
**DIRAGUKAN**

▶ **BUTUH**  
**OPOSISI**  
**LAWAN**  
**JOKOWI**

“Pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota KPU lain dalam melakukan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan suatu tindakan pengabaian terhadap amanat Konstitusi dalam pelaksanaan Pemilu yang harus dilakukan secara berintegritas”

**Muhammad Addi Fauzani**



## Anti Klimaks

Debat kelima calon presiden di Pilpres 2024 menjadi salah satu tontonan yang banyak ditunggu. Banyak kalangan masyarakat memprediksi akan terjadi debat-debat sengit antara para kontestan. Terjadi aksi saling sindir atau bahkan perang gimmick seperti pada debat-debat sebelumnya.

Namun, nyatanya debat terakhir pada 4 Februari 2024 lalu di luar ekspektasi. Bukannya jadi ajang debat, malah jadi tempat saling meminta maaf dan memaafkan di antara ketiga capres. Meski sempat ada percikan-percikan perdebatan, namun tidak ada respons kuat.

Banyak yang menilai semua kandidat ingin main aman dan menghindari blunder politik yang pengaruhnya bisa menurunkan elektabilitas mereka di saat pencoblosan nanti. Di sisi lain, hal itu juga menunjukkan kalau secara garis besar program yang mereka sampaikan adalah sama.

Perbedaannya hanya pada setuju atau tidaknya untuk melanjutkan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. IKN Nusantara jadi simbol politik perbedaan antara para kontestan.

Paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar membawa aspirasi masyarakat yang menolak pembangunan IKN karena dinilai menghabiskan uang negara cukup besar hingga menggerus kantong-kantong APBN di bidang lainnya.

Jargon Perubahan menjadi kata kunci penting bagi AMIN yang mengklaim bisa membawa kemajuan Indonesia lebih baik lagi, sekaligus mengikis habis praktik-praktik curang di masa pemerintahan Joko Widodo.

Paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk saat ini menjadi pasangan paling unggul dari hasil survei. Keunggulan inilah yang membawa motivasi tinggi untuk mampu menang satu putaran.

Selain Prabowo, sosok Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka menjadi orang yang berpengaruh terhadap besarnya dukungan pada pasangan ini. Tujuan mereka jelas yakni melanjutkan pembangunan IKN yang telah dirintis Presiden Jokowi.

Paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga punya peluang yang sama besar dengan 01 dan 02. Meski hasil survei tidak begitu menggembirakan, namun pergerakan para kadernya juga cukup militan sekaligus punya basis suara yang cukup besar.

Pasangan ini juga setuju untuk melanjutkan pembangunan IKN, namun dengan beberapa catatan. Fokus mereka adalah melakukan pemerataan di bidang kesehatan dengan membangun satu desa, satu fasilitas kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan dianggap punya peran penting dan utama untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Program pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, budaya serta sosial secara garis punya kesamaan. Tidak ada perbedaan yang mencolok dari para kontestan karena masalahnya memang sama, yakni kurangnya tingkat kesejahteraan.

Bagi masyarakat sendiri, soal siapa pemimpin mereka nanti tidaklah penting. Hal paling penting adalah bagaimana mereka mampu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Sejahtera dalam berbagai hal mulai dari ekonomi, kesehatan yang terjamin, serta lapangan pekerjaan dan kenyamanan dalam berusaha.

Kemudian ada satu hal yang paling penting yakni adanya keadilan dalam hukum dan penindakan. Pesan penting dalam reformasi yakni menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kalau mereka mampu melakukannya semua pesan-pesan di atas, maka siapapun presiden dan wakilnya dijamin akan membawa Indonesia menuju generasi emas.



**info indonesia** INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO  
Sertifikat Dewan Pers  
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

**PENDIRI/ DIREKTUR** : Usman Rizal

**PEMIMPIN PERUSAHAAN**: Adam Aulia Manzan Khan **PEMIMPIN REDAKSI**: Rusdiyono **WAKIL PIMPINAN REDAKSI**: Rahmad Romli

**REDAKTUR PELAKSANA**: Irmayani **REDAKTUR**: Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina **REPORTER**: Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir **EDITOR & GRAFIS**: Al Amin, Achilles **TATA LETAK**: Sujatmiko **MEDIA SOSIAL**: Haidir Ali

**KEUANGAN** : Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI**: Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS**: M. Iqbal, Zul Fahmi **ADMINISTRASI**: Ega Tri Gustina **DISTRIBUSI**: Abdul Muchtar

**HARGA IKLAN**: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.  
1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

**BANK ACCOUNT**: \*A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur **ALAMAT REDAKSI/IKLAN/**

**PEMASARAN**: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 **TELP** 021-791 96781 **FAX** 021-791 96786 **PALEMBANG** Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Palembang 30126 **TELP** : 0711-7442344



“Sebenarnya debat terakhir mestinya (Anies) gaspol. Jangan takut kelihatan mengkritik dan berbeda, yang penting elegan”

Adi Prayitno

# ANIES PILIH MAIN MANIS

**Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menyampaikan banyak visi misi dan gagasan pada debat terakhir Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu, 4 Februari 2024.**

Anies memulai pemaparan visi misi pada debat kelima dengan bahasa isyarat. Dia terlihat menunjuk jam tangan yang digunakannya pada tangan kiri.

Anies lalu menggerakkan jari seperti mengikat sesuatu dari depan ke belakang. Dalam bahasa isyarat, menunjuk jam tangan berarti waktu. Gerakan menggeser tangan dari depan ke belakang berarti berubah atau perubahan.

Jika dilihat dari tagline kampanyenya, Anies ingin menunjukkan pesan ‘Waktunya Perubahan’ lewat bahasa isyarat yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan teman tuli.

Pada segmen 1, Anies langsung menyinggung ketimpangan dan ketidakadilan. Menurutnya, ketimpangan menjadi fenomena yang membahayakan bidang perekonomian. Alhasil, hanya segelintir orang yang menguasai sebagian besar perekonomian Indonesia.

“Apa masalah hari ini, 45 juta orang belum bekerja dengan layak, bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial, bicara pendidikan jauh dari kota terpencil, masa depan jadi suram, kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya,” tutur eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies menyatakan apabila diberikan amanat, pihaknya bakal memegang prinsip “ngadé sacékna, nilas saplasna.” Ia berkomitmen fokus pada pembangunan manusia Indonesia serta menghadirkan kesetaraan dan keadilan. Pada bagian penutup, Anies mengungkapkan siap bergerak untuk melakukan perubahan.

“Dengan seperti itu, kita ada persatuan, perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia, di manapun berada,” tuturnya.

Memasuki segmen 3, Anies memperoleh kesempatan menjawab pertanyaan yang diajukan tim panelis. Ia bercerita terkait kondisi guru di Indonesia. Anies mengklaim terdapat 1,6 juta guru belum tersertifikasi hingga terjadi beban administrasi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen, salah satu solusi yang diajukan adalah mengangkat 700.000 honorer menjadi guru P3K.

“Program yang menurut saya harus

dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700.000 honorer menjadi guru P3K, kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan,” kata Anies.

Pada segmen 4, Ganjar Pranowo mengajukan pertanyaan untuk Anies. Ganjar menyebut bagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, bisa tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga harapannya betul-betul bisa diterima oleh rakyat.

Anies langsung menjawab dengan lugas sembari mengatakan bansos merupakan bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Oleh sebab itu, bansos diberikan sesuai kebutuhan penerima.

“Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, yang diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan,” ucapnya.

Melalui sesi 6 sekaligus penyampaian pernyataan penutup, Anies menyinggung perjalanan spiritual yang mencapai satu tahun lebih berkeliling Indonesia. Ia menemukan pesan berupa Indonesia yang lebih baik dan lebih adil.

“Dan kami tahu Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta’ala menginginkan kekuasaan

yang  
We-  
las

Asih, yang cinta kasih. Karena itu, kami yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki,” tegas Anies.

Masih di segmen 6, Anies turut menyampaikan terdapat penolakan yang hidup dari ketimpangan. Oleh sebab itu, ia bakal melawan pihak yang merasakan kekuasaan dari ketimpangan. Caranya tidak dengan kebencian dan ketidaksu-kaan.

“Kami akan membawa ini dengan spirit, surodiro joyodiningrat lebur dening pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan,” ujarnya.

## Sentimen Positif

Anies mendulang sentimen positif terbesar di media sosial Twitter atau X saat debat kelima Pilpres 2024. Sebaliknya, Prabowo Subianto mendapat sentimen negatif tertinggi.

Ini merujuk pada hasil analisis Drone Emprit terhadap kicauan warganet di Twitter ketika debat kelima berlangsung pada 4 Februari 2024 pukul 19.00-22.00 WIB.

Menurut analisis Drone Emprit, sentimen positif terhadap Anies Baswedan mencapai 86 persen. Sementara, sentimen negatif terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya 6 persen.

Bersamaan dengan itu, Ganjar Pranowo mendulang sentimen positif terbesar kedua, yakni 72 persen. Sedangkan, sentimen negatif terhadap eks Gubernur Jawa Tengah tersebut

sebesar 14 persen. Adapun sentimen positif terhadap Prabowo Subianto hanya 43 persen. Menteri Pertahanan itu mencatatkan sentimen negatif lebih besar mencapai 48 persen.

Selama debat pula, tercatat bahwa Anies paling banyak diperbincangkan di Twitter dibandingkan dengan dua capres lainnya. “Anies Baswedan memimpin dalam popularitas dan citra positif,” tulis pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, melalui akun Twitter miliknya, @ismailfahmi, Senin, 5 Februari 2024.

Menurut analisis Drone Emprit, Anies mendapatkan sentimen positif karena menyinggung soal bansos plus untuk rakyat, yang bukan mewakili kepentingan pribadi. Anies juga diapresiasi karena membahas isu pelecehan seksual terhadap perempuan.

Sementara, sentimen negatif muncul karena beberapa program yang ditawarkan Anies dianggap sudah dijalankan oleh pemerintah yang sekarang.

## Main Aman

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, Anies bermain aman di debat kelima. Adi menganggap sikap itu ditunjukkan pada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Misalnya, Anies kerap menyampaikan kalimat, “Pak Prabowo yang saya hormati.” Padahal, kata-kata itu tak nampak pada dua debat capres sebelumnya di mana Anies lebih sering menjawab pertanyaan atau menanggapi statemen Prabowo secara langsung.

“Anies tak ingin membangun sentimen negatif dengan tak menyerang secara agresif. Jadinya main manis,” ucap Adi, Senin, 5 Februari 2024.

Selain itu, Anies juga tak lagi menyampaikan pertanyaan menohok atau pun sindiran ke Prabowo. Sikap itu berbeda dengan debat pertama dan ketiga capres.

Bagi Adi, semestinya debat capres terakhir sebelum Pilpres 2024 berlangsung dimanfaatkan Anies untuk semakin menunjukkan perbedaannya dengan Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Sayangnya, sikap itu tak ditunjukkan dengan cenderung bermain aman dan kurang bersikap kritis seperti dua debat sebelumnya.

“Sebenarnya debat terakhir mestinya (Anies) gaspol. Jangan takut kelihatan mengkritik dan berbeda, yang penting elegan,” tutur dia.

Di sisi lain, Adi menduga sikap Anies yang bermain aman ditujukan untuk mempengaruhi konstituen yang sampai saat ini masih gundah atau undecided voters.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan memunculkan narasi yang dapat menimbulkan sentimen negatif agar dapat mempengaruhi ceruk pemilih yang belum menentukan pilihannya.

“Persis, pemilih yang oleng seperti ini mesti hati-hati mendekatnya,” imbuh dia. ●RDO





# PRABOWO LEBIH TENANG YAKIN BISA MENANG

**Prabowo Subianto mengungkapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 memiliki rencana besar dalam visi misinya yang diberi nama strategi transformasi bangsa. Inti dari strategi ini adalah meningkatkan kemakmuran Bangsa Indonesia, terutama memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.**

"Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, dan selama sekolah sampai dari usia dini hingga dewasa," ungkap Prabowo saat debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu malam, 4 Februari 2024.

Menurut Prabowo, rencana ini akan mengatasi angka kematian ibu saat melahirkan, mengatasi masalah kurang gizi pada anak, stunting, serta menghilangkan kemiskinan ekstrem. Rencana tersebut juga diharapkan dapat menyerap semua hasil panen dari para petani dan nelayan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi setidaknya sekitar 1,5-2 persen.

"Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju pada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan, dalam bidang kesehatan, rencananya adalah membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, serta puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Prabowo juga berencana untuk segera mengatasi kekurangan dokter di Indonesia yang mencapai sekitar 140 ribu dokter. Upaya untuk mengatasi kekurangan ini akan dilakukan dengan menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari jumlah saat ini yang mencapai 92, mereka berencana membangun 300 fakultas kedokteran.

Selain itu, Prabowo mengungkapkan akan memberikan beasiswa kepada 10 ribu lulusan SMA yang berprestasi untuk melanjutkan studi kedokteran di luar negeri. Sebanyak 10 ribu siswa lainnya akan mendapatkan beasiswa untuk belajar sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, kimia, biologi, serta fisika.

"Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya ru-

mah, 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan," lanjutnya.

Prabowo meyakini pendidikan memiliki peran strategis. Sehingga, menurutnya, perbaikan gaji guru, termasuk gaji honor, dan peningkatan kompetensi guru adalah hal yang diperlukan. Maka, penting untuk memberikan pelatihan dan penataran kepada guru.

Selain itu, dia berpendapat perbaikan gaji juga harus dilakukan pada seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, dan penyuluh pertanian di seluruh wilayah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

"Itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kami tidak hanya mau pembangunan, kami mau transformasi bangsa di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Demikian pemikiran kami, kami yakin, kami akan melaksanakan itu, dan akan mencapai Indonesia Emas 2045," terangnya.

Prabowo juga menggunakan kesempatan dalam segmen terakhir untuk meminta maaf kepada sejumlah pihak. "Beberapa bulan ini, kami melaksanakan kampanye penuh semangat, penuh kontestasi, penuh kata-kata keras. Tetapi itikad kami baik. Ketiga paslon ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Ia kemudian meminta

maaf kepada paslon nomor urut 1 dan 3 dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Saya, Prabowo, bersama Gibran dan Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 dan paslon 3, seandainya dalam kampanye ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Kami minta maaf ke KPU kalau ada tindakan yang kurang pas," ujarnya.

Menurut Prabowo, ia mempunyai semangat untuk membangun negara, menegakkan kerukunan, persatuan, dan kekeluargaan di atas semua golongan. Ia terutama ingin menegakkan kerukunan di antara pemimpin.

"Saya tetap menganggap Pak Anies, Pak Muhaimin, Mas Ganjar, Pak Mahfud, saudara saya. Kita berjuang untuk rakyat Indonesia," ujarnya.

Apabila Prabowo dan Gibran dari Koalisi Indonesia Maju menerima mandat menjadi pemimpin nasional, Prabowo berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilihnya.

"Kami berjuang, bertekad, menghilangkan kemiskinan, kurang gizi, menghilangkan korupsi, dan berjuang untuk perdamaian bangsa Indonesia," katanya.

## Minim Serangan

Debat terakhir Pilpres 2024 tak seperti debat-debat sebelumnya. Debat kelima ini lebih adem ayem tanpa perdebatan yang keras. Prabowo terlihat lebih banyak sepakat dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Performa Prabowo kali ini sangat berbeda jauh dibandingkan saat tampil pada debat-debat sebelumnya.

Pengamat Politik Universitas Brawijaya (UB), Prof Anang Sujoko,

mengatakan, dari penilaian secara komunikasi nonverbal pada debat kali ini, Prabowo terlihat lebih tenang dibandingkan kedua lawannya.

"Saya melihatnya secara komunikasi nonverbal itu calon presiden nomor urut 01 dan 03 sangat menikmati debat. Tapi calon presiden nomor urut 02 seperti ada tekanan. Terlihat dari wajahnya agak tegang dibandingkan nomor 01 dan 03 yang banyak senyum terlihat rileks," beber Anang.

Anang menyebut ada kemungkinan jika pada kesempatan kali ini Prabowo menerapkan strategi yang telah ditentukan oleh TKN. Strategi yang diterapkan Prabowo berupa banyak memilih memberikan jawaban setuju dan sepakat dengan kedua lawannya.

"Dalam kacamata komunikasi politik ada upaya-upaya untuk meredam sebuah perdebatan yang dimungkinkan terjadi. Kemungkinan nomor urut 02 bisa terjebak, blunder dan kalah. Yang lebih berbahaya lagi bisa memancing emosi dari nomor urut 02," terangnya.

Sementara itu, dari nomor urut 01 dan 03 dalam debat kali ini terlihat cukup sinergi dan saling melengkapi. Gaya penyampaian juga tidak berbeda jauh, keduanya saling memberikan contoh melalui pengalaman atau cerita kesuksesannya selama berada di pemerintahan.

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, juga menganggap tiga capres menghindari sentimen negatif dari publik. Pasalnya, momen semalam adalah debat terakhir yang disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Masa kampanye pun tinggal satu pekan lagi.

"Kalau mereka terlalu keras juga bakal mendapat sentimen negatif," kata Agung.

Agung melihat Anies yang berbeda di debat terakhir. Menurutnya, Anies jadi lebih santai dan tidak menyerang Prabowo secara frontal seperti di debat sebelumnya.

Agung menganggap Anies tidak lagi sekeras sebelumnya karena orang-orang di belakangnya pun memperhatikan sentimen negatif dari publik. Terlebih, saat ini elektabilitas Prabowo-Gibran masih unggul di semua hasil survei.

Agung melihat, kini Ganjar Pranowo yang lebih ingin melakukan perubahan ketimbang Anies. Serangan Ganjar terhadap pemerintahan saat ini dilontarkan beberapa kali dalam debat.

Akan tetapi, Prabowo lebih bisa mengontrol emosi. Serangan Ganjar seolah menjadi tidak terasa. Agung melihat Prabowo tidak mudah terpancing dalam menyikapi serangan.

Di segmen terakhir debat, Prabowo pun mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Prabowo menekankan bahwa Pilpres 2024 bukan ajang untuk saling bermusuhan.

"Itu upaya rekonsiliasi. Meneduhkan. Membuat situasi nasional stabil," kata dia.

•RDO





“Ada lemparan-lemparan dari Pak Ganjar tapi tidak di-smash Anies. Statement yang disampaikan juga terlihat berhati-hati”

*Yahya Maya Sakti*

# GANJAR BIKIN PENDUKUNG SENANG

**Penampilan Ganjar Pranowo di debat kelima Pilpres 2024 dinilai cukup memukau. Mantan gubernur Jawa Tengah itu juga tampil santai menggunakan jaket hitam putih layaknya mahasiswa, sehingga kesan berjiwa muda cukup kental terasa.**

Dalam paparan awalnya, Ganjar mengatakan, untuk membangun Indonesia yang beradab perlu tiga bagian. Pertama soal Kesehatan yang tidak hanya bicara soal pengobatan, tapi juga pencegahan atau preventif.

Tindakan preventif jauh lebih dari pengobatan dengan memperhatikan dan meningkatkan olahraga, memakan makanan bergizi dan hal itu akan membantu dalam politik kesehatan. Kemudian peningkatan fasilitas kesehatan hingga tingkat pedesaan.

“Sehingga kenapa Ganjar -Mahfud membuat program satu desa, satu faskes, satu nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat adat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama,” kata Ganjar.

Setelah semua daerah mendapat pelayanan kesehatan yang merata, kata Ganjar, kemudian meningkatkan akses budaya dan pendidikan yang lebih baik, lebih inklusi dan kurikulum yang mantap. Semua anak didik harus mendapat fasilitas pendidikan yang baik, termasuk nasib guru dan dosen.

Ganjar juga mengaku mendapat amanah dari seorang perempuan dari Yogyakarta yang meminta agar penyandang disabilitas dan kaum wanita mendapat perhatian dalam pendidikan. Melalui pendidikan yang baik, mereka akan mendapat kemampuan yang bisa diandalkan saat bekerja nanti.

“Ini semua bisa kita lakukan bila digitalisasi sudah kita lakukan, infrastrukturnya baik dan tersebar. Sehingga mereka mendapat media yang baik untuk mengembangkan diri,” terangnya.

Untuk itu, mereka juga diberi contoh mulai dari demokrasi yang baik dan memberikan contoh dari pemimpinnya. Tidak ada konflik kepentingan seperti yang dicontohkan Mahfud MD yang memilih mundur sebagai Menko Polhukam.

Ganjar menegaskan, dia dan Mahfud punya tiga janji penting, yakni taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, serta setia kepada rakyat. Janji itu disampaikan berdasarkan hasil kunjungannya berkeliling Indonesia untuk mendengarkan aspirasi seluruh rakyat dari berbagai kalangan.

“Mereka sampaikan, saya catat dalam tiga hal. Yang pertama, bangsa ini sering

sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi. Mulai dari pendidikan yang tidak inklusi. Lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang,” ungkapnya.

## Pendukung Bangsa

Performa baik yang ditampilkan Ganjar membuat tim pendukungnya merasa senang sekaligus bangga. Ada suasana optimisme tinggi terlihat dan hal itu cukup mempengaruhi kebatinan mereka sebagai pendukung. Sikap optimistis itu disampaikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

“Saya yakin, dari TPN juga masyarakat akan bersuara pada tanggal 14 Februari nanti. Mereka akan menggunakan hak pilihnya itu untuk condong ke nomor urut 03 Ganjar-Mahfud. Dan kita melihat trennya juga terus naik,” kata Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Ratu Dewi Nabilla Fatma Sentika, di Tangerang Selatan, Minggu, 4 Februari 2024.

Dia mengungkapkan jika dilihat dari beberapa survei, peminat pasangan Ganjar-Mahfud setiap bulannya terus mengalami peningkatan secara positif. Tren pemilih dari kelompok milenial hingga gen Z condong memilih Ganjar-Mahfud.

Hal tersebut merupakan bentuk optimisme masyarakat, khususnya kalangan anak muda, dalam mempercayai kepemimpinan Ganjar-Mahfud untuk Indonesia lebih baik.

“Dari yang kita lihat itu trennya terus meningkat dari Januari hingga saat ini, tren itu ke Ganjar-Mahfud selalu positif. Dan banyak dari mereka antusias untuk mendukung program Ganjar-Mahfud segera dilaksanakan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keyakinan pemilih anak muda untuk mendukung Ganjar-Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden atas adanya program penyerapan 17 juta lapangan pekerjaan. Sehingga, diyakini akan mendapatkan banyak

pemilih pemula.

“Dari ketiga pasangan yang ada, pasangan nomor urut 03 lebih besar dan fokus pada penanganan pengangguran,” tuturnya.

Ia menilai dalam debat capres tersebut Ganjar menunjukkan dirinya sebagai seorang negarawan yang memiliki substansi baik dengan mencontohkan karakter yang berakhlak.

Ganjar juga telah membuka pembahasan dalam debat tersebut. Gagasan dan visi misi untuk menjawab pembahasan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM dan inklusi dapat diyakini oleh masyarakat Indonesia.

## Anti Klimaks

Meski penampilan Ganjar Pranowo cukup baik, namun banyak yang menilai debat capres edisi terakhir tidak semenarik sebelumnya. Para kandidat lebih cenderung main aman karena takut melakukan blunder hingga bisa mempengaruhi elektabilitas mereka sendiri.

Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Sumsel, Yahya Maya Sakti, mengaku puas dengan performa pasangan 03 meski jalannya debat tidak begitu menarik. Di sisi lain mereka yakin kalau akan terjadi dua putaran.

“Kami yakin terjadi dua putaran tapi agak kurang menarik. Ada lemparan-lemparan dari Pak Ganjar tapi tidak di smash Anies. Statement yang disampaikan juga terlihat berhati-hati,” ujar Yahya.

Beberapa isu terkait sikap otoriter dan perilaku untuk tidak korupsi sempat diangkat Ganjar namun tidak direspons. Bahkan beberapa penyampaian Ganjar malah tidak ada sanggahan, sehingga semua terkesan main aman.

“Semuanya saling setuju, sehingga saya melihat debat capres semalam itu bukan debat. Mereka semua saling menjaga relasi atau main aman. Apalagi, kalau kita lihat penutup hanya capres 03 seorang yang terlihat berpengalaman, jawaban cerdas dari seorang calon presiden,” terangnya.

Menurut Yahya, TPD Sumsel yakin akan bisa memenangkan Ganjar. Hal ini dibuktikan dengan saat kedatangannya di Palembang yang disambut antusias masyarakat.

Sementara itu, pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, menyoroti salah satu pslon yang menyebut akan memastikan 29 kampus. Menurut Bagindo, gerakan tersebut sia-sia.

“Nasi sudah jadi bubur, menurut saya gerakan itu sia-sia, kenapa tidak dilakukan di bulan Oktober saat pendaftaran capres dan penetapan capres,” tegas Bagindo.

Bahkan dia melihat debat capres terakhir berlangsung antiklimaks tidak ada perdebatan sama sekali. Performa Ganjar tidak sebaik di debat ketiga.

Direktur Forum Demokrasi Sriwijaya ini menilai tidak ada ide segar yang ditawarkan para capres, sehingga diskusi berlangsung biasa saja.

• RDO





# PRABOWO-GANJAR SETUJU PERUBAHAN

**Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar, mengklaim Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sudah bergeser setuju dengan konsep perubahan.**

**K**onsep perubahan memang terus diusung oleh Muhaimin Iskandar dan pasangannya Anies Baswedan di Pemilu 2024. Dia pun meminta seluruh rakyat Indonesia untuk merenungkan hati dan pikiran dalam menentukan pilihan saat hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang.

“Pak Prabowo, Pak Ganjar dua-duanya sudah bergeser setuju perubahan. Yok renungkan aja nanti malam, saya gak ngarang ini. Lihat elemen kalimat yang muncul diakhir saat tanya jawab dan diakhir kesimpulan kami merasa sangat berhasil karena pada dasarnya Pak Ganjar maupun Pak Anies itu setuju perubahan,” kata Cak Imin usai debat terakhir capres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, negara sudah seharusnya tidak boleh abai dan cuek dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya demi kesejahteraan bersama.

“Negara tidak boleh cuek, pemerintah tidak boleh abai, negara harus memberikan sebanyak-banyaknya agar kebutuhan rakyat terpenuhi. Sehingga negara tidak boleh berdagang, pemerintah tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Nah itu clue pertamanya,” kata Cak Imin.

Dia menanggapi hal itu setelah melihat hasil perjalanan panjang hampir setahun ini, di mana bertemu dan bersalaman dengan semua orang. Mereka menitipkan pesan bahwasannya mereka ingin Indonesia yang lebih baik dan adil.

Lebih lanjut, Cak Imin

turut bersyukur karena saat debat terakhir Pilpres 2024, Anies mampu menjelajahi semua kebutuhan mendesak, menunjukkan pemerintahan yang memberikan jawaban atau solusi dalam sebuah persoalan, dan pemerintahan yang tidak mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi rakyat.

Cak Imin juga menegaskan bahwa pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) berutang kepada rakyat, bukan kepada oligarki. “Anies-Muhaimin tidak disumbang siapa pun, tetapi disumbang rakyat,” kata Cak Imin di hadapan ribuan relawan dan pendukung AMIN pada kegiatan Istighotsa Qubro doa dan dzikir di Gedung serbaguna Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin, 5 Februari 2024.

Cak Imin menegaskan AMIN berdiri di atas kaki sendiri, sehingga tidak ada aspirasi dari segelintir orang, namun yang ada adalah aspirasi masyarakat Indonesia.

“AMIN menang tidak berutang kepada siapa-siapa, tetapi kepada masyarakat Indonesia,” katanya menegaskan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan hal itu berdasarkan pengalaman panjangnya selama lima periode mengikuti Pemilu di Indonesia.

“Kami tidak punya ikatan sama sekali dengan pihak-pihak manapun, karena kami punya pengalaman panjang, dari berbagai koalisi, dari berbagai calon presiden yang kami dukung,” ungkapnya.

Dia pun mengucapkan terima kasih untuk bantuan dari berbagai kalangan relawan yang telah bekerja keras untuk memenangkan pasangan AMIN.

“AMIN ini bertekad hanya mengabdikan kepada satu, yaitu rakyat,” katanya.

Namun, di sisi lain, Cak Imin menyatakan tidak perlu meniru apa yang dilakukan cawapres nomor urut 03, Mahfud MD, yang mundur dari jabatannya karena ikut Pilpres 2024. Dia menegaskan bahwa jabatan yang perlu diletakkan oleh seorang kontestan pilpres adalah jabatan yang memegang kendali terha-

dap kebijakan dan anggaran.

“Karena saya (Wakil Ketua DPR) bukan jabatan yang memiliki kendali, maka saya tidak terikat. Yang memiliki kendali, baik itu sebagai pimpinan kementerian (yang perlu mundur),” kata Cak Imin.

Berkebalikan dengan itu, dia setuju bila pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ikut meniru langkah Mahfud mundur dari jabatannya selaku Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta.

“Saya berharap semua yang ikut kontestasi, terutama yang memegang policy kendali anggaran, untuk meniru Pak Mahfud,” tegas Cak Imin.

Muhaimin menganggap langkah tersebut merupakan langkah yang baik dari segi demokrasi. “Saya menyambut baik itu bagus agar terjadi satu kondisi yang memajukan demokrasi kita, sehingga Pak Mahfud secara moral, secara integritas akan menjadi lebih otonom, lebih kuat lagi, dan tentu akan membawa suasana demokrasi kita semakin fair,” ungkap dia.

## Kufur Nikmat

Co-Captain Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Beni Pramula, menyebut kufur jika seseorang tak memilih pasangan nomor urut 01.

Beni menyebut Anies-Cak Imin merupakan paket yang lengkap untuk memimpin Indonesia. Dia menyebut Anies adalah seorang intelektual, sementara Cak Imin adalah santri yang menyuarakan suara rakyat melalui politik.

“Yang satu adalah seorang dosen intelektual dan juga aktivis. Yang satu seorang santri dan juga politikus yang mumpuni rekam jejaknya di republik ini, taat ibadahnya. Insya Allah kedua tokoh nasionalis religius ini figur terbaik yang diberikan dianugerahi oleh Allah bagi rakyat Indonesia,” kata Beni dalam ‘Konsolidasi Nasional Pusat Komando Saksi, Pengamanan, dan Pengawasan Suara AMIN’ di Nam Centre, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.

Dia menyebut kufur jika tak memilih AMIN. Menurutnya, memilih pemimpin bagian dari berjuang di jalan kebaikan.

“Maka bagi kita kufur kalau seandainya tidak pilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Memilih, menjaga dan memenangkan keduanya ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah, kenapa saya katakan jihad karena ini adalah bagian proses dari kita menjaga demokrasi, merawat demokrasi,” ujar Beni.

“Dan pemilihan, pergantian kepemimpinan di negeri kita adalah bagian daripada berjuang di jalan Allah untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara yang dicintai ini,” sambungnya.

Dia mengatakan bangsa Indonesia harus mengganti kepemimpinan yang zalim. Dia meminta pendukung untuk turun ke lapangan memenangkan AMIN.

“Kalau sudah bagian untuk berjuang memperbaiki kondisi bangsa, mengganti kepemimpinan yang zalim dengan kepemimpinan yang adil maka itu adalah bagian jihad fi sabilillah,” ujar Beni. ●RDO





“Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka”

*Fahri Bachmid*

# KETUA KPU BERMASALAH STATUS GIBRAN TETAP SAH

**Calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, terus menjadi sorotan publik dalam keikutsertaannya di Pilpres 2024. Terbaru, statusnya sebagai cawapres dipertanyakan setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran dirinya sebagai pendamping Prabowo Subianto.**

**P**utra sulung Presiden Joko Widodo ini tidak berkomentar banyak terkait persoalan tersebut. Dia hanya bilang bahwa pihaknya akan menindaklanjuti putusan itu.

“Ya nanti kami tindaklanjuti,” kata Gibran usai acara pertemuan dengan pimpinan Relawan Prabowo-Gibran di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyatakan, pendaftaran Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto telah sesuai dengan konstitusi. Artinya, secara hukum majunya Gibran sebagai kandidat di Pilpres 2024 tidak bermasalah.

“Kami sedang mempelajari lagi putusan DKPP ini ya yang jelas kan di halaman 188-nya disebut bahwa sikap KPU menerima pendaftaran itu sudah sesuai dengan konstitusi, sehingga sebenarnya secara hukum tidak ada masalah dengan pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres,” kata Habiburokhman di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin, 5 Februari 2024.

Habiburokhman menyampaikan, TKN mempelajari putusan DKPP sebagai langkah antisipasi apabila putusan DKPP tersebut dikapitalisasi untuk menyerang Prabowo-Gibran jelang pencoblosan.

“Hanya saja kami mengantisipasi kemungkinan ya masalah ini dikapitalisasi sebagai serangan politik kepada paslon Prabowo-Gibran. Pasti akan ada kaset rusak yang akan diputar berulang-ulang oleh mereka yang takut kalah bawa soal etika dan lain se-

bagainya,” jelas dia.

“Padahal ini tidak ada kaitannya. Ini lebih merupakan keputusan terkait persoalan teknis yang secara substansinya sudah tidak ada masalah,” lanjut dia.

## Tetap Sah

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, berpendapat sanksi DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai legal subject Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta legitimate,” katanya, Selasa, 6 Februari 2024.

Fahri menerangkan, dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda. Pertama, status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan, yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi “a quo” tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat, dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

“Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” ujar Fahri.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menyampaikan, putusan DKPP terkait adanya pelanggaran etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka oleh Ketua KPU Hasyim Asyari tidak serta-merta membatalkan pencalonan Gibran.

“Tidak serta-merta karena fungsi DKPP itu kan bukan membatalkan apa yang sudah jadi keputusan dari penyelenggara Pemilu,” kata Feri.

Feri menuturkan, DKPP hanya menilai mengenai tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan negara, dalam hal ini penyelenggara Pemilu, berada dalam kategori etis atau sebaliknya. Dia me-

nuturkan, perlu ada proses hukum berikutnya yang membawa pengaruh pada kemungkinan pembatalan pencalonan Gibran.

“Dan proses hukum itu yang menentukan untuk dilakukan upaya pembatalan Gibran, misalnya di Pengadilan Tata Usaha Negara atau sengketa administrasi di Bawaslu. Tentu butuh keberanian yang cukup besar, jika melihat siapa yang diuntungkan dari penyimpangan yang dilakukan oleh KPU,” beber Feri.

Namun, menurut Feri, putusan itu seharusnya mampu membuat Hasyim dipecat sebagai Ketua KPU. Sebab, pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu itu sudah berkali-kali diberikan sanksi.

“Harusnya dipecat jadi anggota KPU atau setidaknya dipecat jadi ketua KPU karena telah berkali-kali diberi sanksi keras dengan peringatan terakhir,” ungkapnya.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Gibran Rakabuming Raka agar mundur sebagai cawapres. Permintaan Busyro tersebut didasari oleh putusan DKPP.

“Bagaimana ada satu tekanan mas-sal supaya Presiden Jokowi mempertimbangkan dengan seksama. Yaitu agar anaknya yang walaupun sudah jadi cawapres resmi calon, paslon cawapres tapi dengan putusan DKPP cacat secara etika dan moral sekaligus, sebaiknya dipertimbangkan untuk memerintahkan mundur sebagai (calon wakil) presiden,” jelas Busyro di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Busyro menilai, putusan DKPP tersebut menjadi puncak dari problem etik yang terjadi belakangan ini. Permintaan agar Jokowi memerintahkan mundur menurutnya menjadi satu-satunya cara. Pasalnya, penyelesaian problem etik ini sudah tidak mungkin ditempuh melalui jalur hukum.

“Penyelesaian secara hukum di Indonesia itu hampir mustahil karena Mahkamah Konstitusi sebagai puncak itu pun juga sudah direnggut independency martabatnya oleh pihak-pihak yang terkait dengan keluarga Gibran, lalu sekarang kuncinya ialah problem etik ini harus menjadi agenda seluruh elemen kekuatan masyarakat sipil,” ungkapnya.

Busyro meyakini jika menyelesaikan problem etika ini tidak terbatas ruang dan waktu. Adapun masalah mekanisme jika cara tersebut dilakukan, bisa dengan kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat.

“Mekanismenya itu bisa disepakati, ada satu pertemuan tokoh-tokoh masyarakat sipil yang memiliki track record yang bagus untuk mengambil keputusan darurat etika kenegaraan sekarang,” imbuhnya.

Busyro juga meyakini jika langkah memerintahkan Gibran mundur tidak akan mengganggu proses Pilpres kendati tinggal sembilan hari lagi.

“Mengganggu atau tidak kan tergantung bagaimana konsep mengganggu itu, memangnya kalau ini diteruskan tidak mengganggu, tidak lahir kemungkinan potensi presiden yang dipaksakan secara melanggar etik dan presiden yang terpilih itu tidak memiliki legitimasi, artinya sudah mengalami delegitimasi sejak terutama putusan DKPP,” tutupnya. •RDO





# PEMILU 2024 PALING BRUTAL

**Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju (KIM).**

**M**ahfud resmi menanggalkan jabatannya usai memberikan surat permohonan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024.

“Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu,” kata Mahfud di Istana.

Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Jokowi lantaran telah dipercaya menjabat Menko Polhukam sejak 19 Oktober 2019. Menurutnya, pengangkatannya menjadi Menko Polhukam merupakan sebuah penghormatan dari Jokowi kepada dirinya.

“Pengangkatannya penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu,” tegas dia.

Wacana mundurnya Mahfud dari kabinet sudah muncul sejak beberapa pekan terakhir. Pada 31 Januari 2024, Mahfud secara terbuka telah menyiapkan surat pengunduran diri yang

akan diberikan kepada Jokowi. Pengunduran diri Mahfud tak lain karena dirinya maju sebagai pendamping Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.

Presiden Jokowi lalu menyetujui pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Mahfud.

“Penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 2

Februari 2024.

Usai menanggalkan jabatannya, Mahfud bisa lebih leluasa dalam berkampanye jelang Pilpres 2024 yang tinggal sepekan lagi. Bahkan, dalam acara Rosi di Kompas TV, Kamis malam, 1 Februari 2024, Mahfud menilai memang benar Pemilu 2024 sebagai pemilu yang paling brutal sepanjang era reformasi. Awalnya Mahfud ditanya, apakah benar pemilu tahun 2024 ini menjadi yang paling brutal?

“Iya (Pemilu 2024 sebagai pemilu paling brutal), kalau dibandingkan selama reformasi ya,” ujarnya.

Mahfud kemudian membeberkan, pemilu 1999 berjalan dengan baik, begitu juga dengan pemilu berikutnya 2004 dan 2009. Ia bahkan sempat menyinggung sikap netralitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sama sekali tak menyentuh ranah yudikatif saat mencalonkan diri kembali sebagai petahana.

“Itu kan 2009 saya Hakim MK-nya, itu Pak SBY presiden, sama sekali enggak ada hubungan dengan saya untuk bicara perkara, dan saya enggak mau dan dia tau. Jadi, Pak SBY enggak pernah mau bicara perkara, ngutus orang ketemu saya enggak, pada waktu 2009 itu,” ucap Mahfud.

Namun kali ini, Mahfud bercerita tentang bagaimana kecurangan terjadi secara brutal, termasuk bentuk intimidasi dan penurunan alat peraga kampanye yang terjadi di beberapa daerah. “Se s u a t u yang real di beberapa tempat tertentu, tidak di semua tempat juga. Misalnya di Aceh, saya tanya kanan kiri tidak ada intimidasi. Tapi mungkin karena elektoralnya tidak banyak di sana,” ucapnya.

Kecurangan penurunan alat peraga kampanye itu

banyak terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera bagian padat penduduk. “Tapi kalau di Jawa kan banyak itu, di Sumatera juga banyak tiba-tiba whoss gitu hilang satu malam, kalau ditanya ‘nggak tau masyarakat sendiri’ tapi yang satunya nggak hilang, malah bertambah. Itu kan (katanya) masyarakat sendiri juga,” imbuh Mahfud.

Meski demikian, ia mengaku tak khawatir karena sudah bekerja puluhan tahun di bidang politik dan hukum di Indonesia.

“Kalau saya pribadi biasa kan sudah puluhan tahun bekerja di situ, itu bisa saja sering juga terjadi tetapi mungkin tingkat brutalitasnya yang agak berbeda ya. tingkat brutalitasnya dan nekatnya itu,” tegasnya.

Pada kesempatan lain, Mahfud menyatakan, partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar-Mahfud seperti bebek yang bisa dikendalikan. Awalnya, Mahfud mengklaim bahwa Ganjar dan dirinya bukanlah petugas partai yang dapat diatur oleh partai politik pengusungnya, seperti yang kerap dijuluki oleh banyak orang.

“Seperti dikesankan, kalau apa yang dicalonkan pasangan Ganjar-Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai, kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai,” kata Mahfud dalam acara ‘Tabrak Profl’ di Yogyakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Mahfud menuturkan, kampanye yang dijalankan oleh Ganjar-Mahfud tidak terikat oleh arahan partai. Ia mengklaim, kampanye yang dilakukan ini berbasis fakta dan solusi yang ditawarkan pun sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun, menurut Mahfud, justru pemimpin partai politik yang tidak mengusung Ganjar-Mahfud dapat dikendalikan seperti bebek.

“Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau, tapi mari Saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan?” kata dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyatakan, partai politik pengusung Ganjar-Mahfud mempunyai kebebasan dalam mendukung calon yang diusung, tidak seperti partai yang mengusung kandidat lain.

“Yang ngusung kami, partai yang mengusung kami ini gagah, ‘Ayo calon presiden, maju’. Maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan. Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki,” kata Mahfud. ●RDO





“Penunjukkan Tito sebagai Plt Menkopolhukam dinilai dapat meningkatkan keraguan masyarakat terhadap netralitas aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu”

M. Jamiluddin Ritonga

# NETRALITAS TITO KARNAVIAN DIRAGUKAN

**Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan surat keputusan presiden (keppres) terkait pemberhentian Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).**

**K**epres dengan Nomor 20/P Tahun 2024 tersebut resmi ditandatangani pada Jumat 2 Februari 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengumumkan pemberhentian tersebut dalam keterangan tertulis.

“Presiden telah menandatangani Keppres No 20/P Tahun 2024, yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam,” tulisnya.

Dalam keputusan yang sama, Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai pelaksana tugas (plt) Menko Polhukam.

“Penunjukkan Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif,” sambungnya.

Ari menjelaskan alasan di balik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md.

Ari menyatakan bahwa kementerian yang saat ini dipimpin oleh Tito Karnavian berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Selain itu, Tito dianggap sebagai salah satu menteri senior.

“Tito Karnavian termasuk dalam jajaran menteri Kemenko Polhukam dan merupakan salah satu menteri senior, bersama dengan beberapa menteri lainnya,” kata Ari.

Sebelumnya, Mahfud Md secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Jokowi.

“Pak Presiden menyatakan bahwa Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama sepanjang pemerintahan Pak Jokowi,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan bahwa tidak ada ketegangan antara dirinya dan Jokowi selama proses pengunduran diri. Sebaliknya, keduanya sempat berdiskusi ringan mengenai arah masa depan Indonesia.

“Tadi banyak bergurau dan bicara bah-

wa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita,” ungkap Mahfud.

Meskipun mengakui bahwa pekerjaannya belum sempurna, Mahfud menyatakan tekadnya untuk terus bekerja keras demi meningkatkan kualitas tugas negara.

“Tidak mungkin sempurna, tidak mungkin bisa menyelesaikan semua dalam waktu pendek. Sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh,” tegas Mahfud.

Namun, penunjukkan Tito ini mendapat kritik karena ada keraguan terkait netralitasnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyatakan bahwa penunjukkan Tito Karnavian sebagai Plt Menkopolhukam menimbulkan tanda tanya.

Diketahui bahwa Tito dianggap dekat dengan Joko Widodo, sehingga sulit untuk dianggap netral dalam pemilu yang akan datang.

“Sorotan utama publik saat ini adalah terkait netralitas aparat dalam Pemilihan Presiden 2024. Penunjukkan Tito sebagai Plt Menkopolhukam dinilai dapat meningkatkan keraguan masyarakat terhadap netralitas aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu,” ujar Ritonga.

Ritonga menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan netralitas aparat dalam Pemilu Presiden 2024. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Jokowi memilih pengganti Mahfud MD yang dapat diterima oleh mayoritas masyarakat.

Langkah tersebut dianggap penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

“Kepercayaan masyarakat terhadap pemilu harus dipulihkan agar hasilnya tidak diragukan. Tanpa kepercayaan, hasil pemilu bisa dipertanyakan oleh banyak pihak, dan hal ini akan mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang terpilih,” ungkapnya.

Ritonga menekankan bahwa tanpa kepercayaan masyarakat, pemerintahan yang terpilih mungkin tidak akan diakui secara maksimal. Oleh karena itu, langkah-langkah yang mendukung kepercayaan publik terhadap integritas pemilu

menjadi krusial agar hasilnya diakui dan pemerintahan dapat efektif dalam memimpin dan membangun negara.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), memberikan tanggapan terhadap penunjukan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam, menggantikan Mahfud MD. Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan tersebut setelah mencalonkan diri sebagai Cawapres nomor urut 3.

Pernyataan ini disampaikan

oleh Cak Imin saat deklarasi dukungan dari keluarga besar Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) dan Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) kepada pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Kantor DPP PKB, Jakarta, pada Minggu 4 Februari 2024.

Cak Imin menganggap penunjukan Tito sebagai Plt Menko Polhukam sebagai hak dan kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan.

“Namun yang terpenting adalah kita menitipkan kepada Pak Tito, bahwa bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa negarawan. Kita tidak ingin kecewa dengan cara politik yang dapat merugikan kita semua,” ujar Cak Imin.

Cak Imin tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai desakan kepada Jokowi untuk segera mengukuhkan jabatan Menko Polhukam yang saat ini dijabat oleh Plt.

“Tentu, kewenangan berada di tangan Presiden, sekali lagi. Presiden memiliki hak prerogatif, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa,” kata Cak Imin.

Co-captain Timnas AMIN, Sudirman Said berharap agar sosok Tito dapat menjaga netralitas dan objektivitas pada Pemilu 2024.

“Kalau Pak Tito bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menkopolhukam atau merangkap jabatan apapun, tapi tetap menjaga netralitas, menjaga objektivitas, menjadi penjaga pemilu yang netral, insya Allah beliau akan meninggalkan legacy. Kita doakan seperti itu,” kata Sudirman saat ditemui di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro 10.

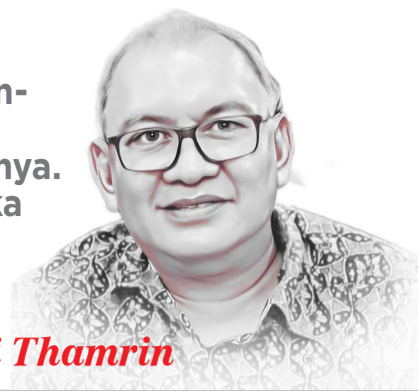
Tito memandang saat ini membutuhkan banyak sosok teladan. Karena itu, Sudirman pun menaruh kepercayaan kepada sosok Tito.

“Penunjukan menteri hak prerogatif presiden. Kita hormati dan kalau saya boleh memberi harapan pada Pak Tito, menaruh kepercayaan pada Pak Tito bahwa negara ini makin butuh banyak teladan,” ucapnya. ●IRY



“Benar-benar ditutup dengan anti klimaks kurang menarik seperti sebelumnya. Kalau saya menilai mereka sengaja untuk mencari aman”

**Muhammad Husni Thamrin**



# DEBAT ANTIKLIMAKS KONTESTAN MAIN PENCITRAAN

**Kompetisi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 telah masuk babak penghujung adu debat visi dan misi selalu berjalan super panas penuh kontroversi. Namun di debat final ketiga Capres kontestan nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan nomor urut 3 Prabowo Subianto seharusnya meledakkan jurus terakhir di laga pamungkas malah berakhir anti klimaks.**

**P**enampilan para calon presiden pada debat pamungkas ternyata di luar harapan. Hampir tidak ada adu argumen sehingga cenderung sebagai diskusi biasa. Mereka sama-sama menghindari blunder yang berakibat dapat mengganggu elektabilitas suara menjelang pencoblosan nanti.

Kekecewaan bukan hanya dari masyarakat yang menonton saja tapi juga dari pengamat politik dan akademisi. Mereka tidak melihat para kandidat bersikap teguh mempertahankan pendapatnya bahkan saling menyetujui satu sama lain.

Pengamat politik dan kebijakan publik Muhammad Husni Thamrin menyebutkan kekecewaan kepada debat final dinilai mengalami penurunan tensi persaingan ketiga kontestan di ajang penutupan atau final debat Pilpres 2024. Kondisi ini dinilai karena efek ketiga kontestan memainkan pola aman.

“Benar-benar ditutup dengan anti klimaks kurang menarik seperti sebelumnya. Kalau saya menilai mereka sengaja untuk mencari aman. Kalau ditinjau dari ritme perjalanan semua debat sebelumnya seharusnya terakhir lebih meledak lagi,” kata dia.

Dilanjutkannya aksi saling serang yang biasa ditunjukkan pada sessions tanya jawab tidak terlihat menarik sama sekali hanya sekali paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan serangan kepada Prabowo Subianto. Hal itu juga meminta tanggapan tentang makanan gratis dan internet gratis dinilai

Prabowo Subianto jauh lebih utama untuk rakyat itu makanan gratis.

“Kalau kita cermati hanya pertanyaan Ganjar saja yang sekali menyerang Prabowo Subianto sisanya tidak ada timpal menimpali jawaban dan pertanyaan. Sedangkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tidak melakukan serangan sama sekali,” ucapkan.

Menurut dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) ini debat di akhir kompetisi Pilpres dari ketiga paslon lebih dititikberatkan kepada perbaikan pencitraan dari sebelumnya. Kondisi memperbaiki citra diri itu berdampak kepada datarnya performa intensitas ketiganya dalam kompetisi ajang debat terakhir tersebut.

“Pak Prabowo bahkan memuji Pak Anies mantan menteri pendidikan dan ada permintaan maaf di sesi closing statement. Jadi aneh adanya ajang minta maaf, debat ini menjadi ajang pencitraan diri kepada rakyat saja. Kemungkinan karena di debat sebelumnya mereka merasa terlalu memiliki citra kurang baik untuk rakyat akhirnya di debat terakhir ketiga kompak tidak saling bantah,” jelasnya

Baginya debat lebih terfokus kepada pemaparan visi dan misi ketiga kontestan untuk menunjuk siapa yang terbaik apabila dipercaya menjadi Presiden di 5 tahun kedepannya. Namun substansi dari tema meliputi Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi dinilai kurang terjawab secara maksimal.

Sayangnya dari debat itu ada beberapa substansi tidak terjawab dengan baik mereka lebih berbicara dengan pembangunan yang

disambungkan dengan visi dan misi tetapi poin dari pertanyaan tidak dijawab. Seperti kesehatan mereka tidak menjawab penting promosi kesehatan untuk kesadaran masyarakat tetapi lebih ke fasilitas kesehatan saja.

“Misalnya lagi soal disabilitas banyak berbicara soal mereka saja padahal ada undang-undangnya itu tidak dibahas. Sebenarnya pemerintah wajib membentuk unit layanan disabilitas perguruan tinggi karena undang-undang tadi ada,” ungkapnya.

Dia menilai hasil dari debat hanya akan berdampak 5 persen calon pemilih, rakyat masih mencari-cari pilihan belum memiliki pilihan terkotak kategori swing voter dinilai masih lebih banyak. Terlebih lagi iklim politik yang mengecewakan rakyat Indonesia terkait dukungan dari Presiden terhadap salah satu calon tertentu.

“Iklim politik hari ini kalau dinilai berjalan kondusif atau tidak pastinya jelas tidak. Sebab adanya campur tangan Presiden masyarakat bisa menilai sendiri tidak bego! Ini bukan pendapat pribadi saya saja, dari gerakan perguruan tinggi juga sudah bersuara soal ini. Tentunya sangatlah berdampak kepada rakyat malas dan banyaknya swing voter belum menentukan pilihan,” pungkasnya.

Pengamat Komunikasi Politik Sulaiman Helmi menyebutkan hal serupa debat terakhir Pilpres tidak menandai kontroversi seperti debat sebelumnya. Biasanya debat menandai kontroversi yang menarik untuk disimak publik bisa menjadi pembahasan hangat di semua kalangan elit politik sampai ke akar rumput.

## Tidak Ada Kontroversi

“Tidak menyerang tanpa ada kontroversi mereka saling sepakat bermain aman terlihat dari komentar yang diberikan satu sama lain. Hanya sekali saja ada serangan dari Ganjar ke Prabowo sisanya lebih ke edukasi visi dan misi dari para paslon,” kata Akademisi dari Universitas Bina Darma (UBD) ini.

Dalam analisis komunikasi politik kondisi itu disebutkan terjadi karena mereka tidak memiliki waktu untuk menyapu semua konflik apabila terjadi dari hasil debat terakhir tersebut. Kalau kontroversi dibuat pada debat terakhir para kontestan takut terjadi black campaign sulit untuk dibendung atau disapu akan berdampak buruk pada pemilihan berlangsung sebentar lagi pada tanggal 14 Februari nanti.

“Tidak ada waktu untuk membersihkan efek dari debat apabila berlangsung saling serang dan memicu kontroversi seperti sebelumnya. Makanya mereka secara tidak sengaja kompak menjalin komunikasi politik trik cari aman. Kalau ada kontroversi gawat sebab sulit diklasifikasi pemilihan sudah dekat tidak ada waktu. Kemungkinan kenapa mereka bisa kompak tidak terlalu saling serang karena mereka belajar dari pengalaman debat-debat sebelumnya,” ungkapnya.

Ditinjau dari bahasa tubuh ketiga paslon ingin meninggalkan kesan manis kepada rakyat Indonesia dengan menerapkan gesture yang juga tidak saling menjatuhkan atau seakan-akan saling membenci seperti sebelumnya.

Hanya saja Ganjar Pranowo yang sempat mengeluarkan gesture tubuh mengejek dengan memberikan komentar Prabowo Subianto merendahkan internet gratis lebih memilih makan gratis.

“Dari keseluruhan bahasa tubuh para paslon juga tidak terlalu menghebohkan seperti sebelumnya. Mereka ingin menutup debat terakhir dengan manis lebih kepada edukasi visi dan misi saja. Saat closing stamen juga ada yang meminta maaf,” jelasnya.

Namun dari hasil debat terakhir dia menilai Anies Baswedan lebih diunggulkan karena adanya tema pendidikan. Retorika Anies Baswedan lebih meyakinkan dibandingkan kedua kontestan lainnya karena sisi akademisi yang melekat kepadanya.

Lalu Anies pernah menjadi Mendikbud di era awal pemerintahan Presiden Jokowi dulu juga memiliki dampak pengetahuan tingkat pendidikan lebih luas lagi.

“Kalau dari keseluruhan hasil debat terakhir Anies Baswedan lebih unggul karena diunggulkan ada tema pendidikan. Kalau untuk lainnya kesemuanya sama kuat mereka memilih tidak banyak saling menjatuhkan. Kalau dari retorika penyampaian Anies Baswedan lebih unggul,” pungkasnya.

●RDR





“Kalau Presiden kampanye untuk dirinya sendiri itu tidak masalah tetapi ini untuk anaknya! Jelas dia ada di bawah baliho 02 membagikan Bansos, Presiden itu milik kita semua”

Antoni Toha

# KASUS PELANGGARAN MENUMPUK PANITIA PENYELENGGARA CUEK!

**Ajang demokrasi rakyat pelaksanaan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 dilaporkan rentan dengan berbagai pelanggaran ditemukan sepanjang perjalanannya. Namun mirisnya penyelenggara dinilai cuek dengan menggan-tungkan kasus laporan kecurangan hingga terke-san menjadi menumpuk saja.**

Sehingga meski suasana politik ini terkesan tenang dan terlihat tentram di masyarakat namun situasinya berbeda. Ada nuansa ngeri-ngeri sedap menjelang pencoblosan Pilpres 2024. Bila tidak segera diantisipasi dengan cepat maka kerusakan demokrasi di Indonesia akan bertambah parah.

Tim pasangan calon (Paslon) 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar merasakan betul ada ketimpangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Nuansa ketidaknetralan baik dari pemerintah maupun penyelenggara Pemilu terlihat jelas

Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Sum-sel HM Antoni Toha mengungkapkan, mereka telah melaporkan semua kejadian kecurangan politik ditemukan oleh relawan dan elemen masyarakat. Namun prosesnya tersumbat dan ajang pesta demokrasi rakyat tidak terwujud sesuai dengan apa yang seharusnya.

Kondisi ini bukan hanya terjadi di Sumatera Selatan saja melainkan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, AMIN terasa dicurangi dan dizalimi.

“Kami Tim Hukum nomor urut 01 AMIN mendapatkan banyak sekali laporan dari kecurangan ditemukan dan diterima tetapi belum ada proses sambung (digantung). Sedangkan kasus kecurangan lainnya terus bertambah. Sementara kasus awal saja belum diverifikasi oleh pihak penyelenggara lalu menumpuk laporan lainnya,” kata Antoni Toha.

Antoni Toha menilai pihak penyelenggara Bawaslu dan KPU seharusnya terbuka saja kepada mereka agar adanya kejelasan untuk mewujudkan demokrasi khususnya di Sumsel. Karena sebagai kuasa hukum AMIN mereka tidak bisa mengawal kasus kecurangan politik yang telah dilaporkannya tersebut secara terang ben-derang.

“Kami meminta Bawaslu dan KPU jelas-jelas saja apakah laporan kami telah di-verifikasi atau belum! Misalnya laporan itu atau temuan adanya kecurangan itu tidak lengkap atau ada yang kurang beritahu-

kan. Tentunya biar semua jelas biar kami sebagai Tim Hukum AMIN bisa mengawal semua laporan kecurangan kita alami menjadi terbuka dan jelas,” tegasnya.

Ada banyak kecurangan yang dilaporkan relawan. Mulai dari adanya bantuan Bansos dari pemerintah yang ditempelkan salah satu gambar paslon tertentu. Bahkan semua izin kampanye AMIN dilakukan di setiap daerah banyak dibatalkan.

“Selanjutnya izin-izin kampanye AMIN dibatalkan sepihak membuat kita memiliki ruang yang sempit untuk berkampanye. Itu semua laporan lama yang sudah kita laporkan secara administrasi tersusun tetapi belum diproses secara cepat sampai sekarang. Tetapi bagi kita kecurangan politik itu walaupun tidak diproses semua orang sudah tahu. Siapa yang melakukan-nya,” tegasnya.

Baginya efek dari penyelenggara tidak memproses semua laporannya tentunya secara moral bertentangan dengan fundamental dari tugas pokoknya penyelenggaraan Pilpres 2024. Penyelenggara dibentuk untuk menjalankan amanah undang-undang tetapi tidak menjalankan semua itu sangat miris untuk disaksikan oleh

rakyat Indonesia.

“Bawaslu dan KPU itu digaji oleh rakyat, pertanggungjawaban kepada rakyat dan demokrasi itu adalah hak rakyat. Mereka akan perang batin kepada rakyat karena pertanggung jawabannya sampai dunia akhirat Bawaslu dan KPU dilantik untuk itu!,” ucap Dewan Pembina Komunitas Mobil Pajero di Sumsel ini.

Secara terang Antoni Toha memberikan tingkat kepercayaan kepada penyelenggara dimulai dari angka 10 dia memberikan penilaian 6. Hal itu diyakininya tidak hanya mereka sebagai Tim Hukum AMIN saja semua rakyat di Indonesia saja pasti serupa memberikan penilaian rendah terhadap kinerja dan netralitas.

“Kalau tidak percaya coba media membuka tingkat penilaian kepuasan dari masyarakat kepada pihak penyelenggara, coba lihat hasilnya nanti? Saya yakin penilaian akan merosot, kalau saya memberikan nilai di angka 6 dari 10 tingkat kepuasan,” kata dia.

Netralisasi di Pilpres baginya sangat-sangat memprihatinkan di matanya dianalogikan seperti sebuah kompetisi sepakbola Pilpres 2024 seakan-akan berjalan tidak fair play.

Seharusnya kompetisi berjalan sportif namun wasit dan pemilik lapangan sepakbola berpihak kepada salah satu paslon saja.

Dia juga menggambarkan Pilpres seperti anatomi tubuh manusia berjalan tidak baik adanya aliran darah yang tersumbat bisa berdampak penyakit stroke.

“Apabila berjalan sportif politik bisa menjadi edukasi untuk semua orang! Tetapi retorika politik saat ini sudah menjadi gelombang tsunami demokrasi,” tegasnya.

Dia juga menyikapi tindakan kepala negara yang memberikan dukungan kepada salah satu paslon. Terlebih lagi disebutkannya Presiden Joko Widodo memberikan keterangan tegas dengan menunjukkan aturan dia bisa berkampanye.

Kondisi itu membuatnya sebagai Tim Hukum AMIN menepuk jidat seorang presiden secara terang-terangan menunjukkan ketidaknetralan atau berpihak.

“Kalau Presiden kampanye untuk dirinya sendiri itu tidak masalah tetapi ini untuk anaknya! Jelas dia ada di bawah baliho 02 membagikan Bansos, Presiden itu milik kita semua. Dia harus bisa menjamin jalannya demokrasi secara benar sesuai amalan undang-undang. Di era Orde Baru Soeharto saja tidak pernah seperti itu ikut campur urusan anaknya,” tuturnya.

Hal yang dicermati dirinya berlanjut kepada kekhawatiran setelah selesai Pilpres akan berdampak kepada rakyat Indonesia kedepan dan pemimpin bangsa nantinya. Baginya kalau rakyat Indonesia tidak move on atau masih menilai calon yang dipilihnya tidak sesuai dengan harapan mereka akan sulit menjalankan Indonesia di 5 tahun kedepannya.

“Kalau rakyat tidak move on dan menyebutkan presiden yang mereka pilih tidak sah bagaimana! Kondisi itu juga bukan tidak baik kepada rakyatnya tetapi pemimpin bangsa berdampak sulit menjalankan programnya. Namun semoga semua itu tidak terjadi setelah Pilpres tidak menyalakan kekecewaan-kekecewaan tersebut,” terangnya.

Menyikapi kondisi itu Tim Hukum AMIN mempersiapkan tim khusus untuk mengawal agar tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan saat pemilihan berlangsung. Semua telah dipersiapkan agar AMIN pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menjalankan kompetisi secara adil dan aman selama penyelenggaraan Pilpres 2024.

Bahkan saat ini mereka telah membentuk Satgas di seluruh Indonesia tidak dibayar menjadi energi positif untuk kami bisa mengawal pelaksanaan pemilihan nanti. Kalau untuk target secara optimis kami satu putaran kalau secara rasional target kita dua putaran.

“Sebenarnya survei pribadi yang kami jalankan AMIN bisa menang satu putaran kalau kalian boleh lihat masa kampanye siapa paling banyak secara real bukan secara survei lembaga lembaga tertentu,” pungkasnya. ●RDR



“Satu suara presiden dan satu suara petani itu sama. Kita percaya masyarakat kita itu sangat menginginkan kesejahteraan, tidak ingin dikekang, tidak ingin pemimpin yang arogan, dan tidak ingin negara ini banyak hutang”

*Tun Teja*



# SEMUA MASIH DALAM PENGARUH JOKOWI

**Figur orang nomor satu di Indonesia Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ikut berkampanye disinyalir akan berdampak kompetisi Pilpres 2024 bisa rampung hanya satu putaran saja. Pasalnya magnet Jokowi diduga bisa saja mempengaruhi pilihan rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024.**

Tidak bisa dipungkiri sosok Jokowi masih berpengaruh kuat pada politik Indonesia. Tinggal butuh pembuktian apakah sosok Presiden Indonesia itu masih kuat di Pilpres 2024 atau bisa diruntuhkan dengan konsep perubahan.

Tun Teja Kader Partai PDI Perjuangan Perwakilan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengatakan, munculnya sosok Jokowi dalam kompetisi Pilpres tidak akan berdampak kepada kemenangan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kendati pernyataan Jokowi kepada publik jelas Presiden RI boleh mendukung salah satu paslon yang mengisyaratkan dirinya mendukung salah satu anaknya ikut berkompetisi sebagai Cawapres.

“Kalau kita bicara Banteng mau nol persen pun kita yakin menang! Seorang Jokowi itu bidaknya PDI Perjuangan loh jangan lupa, ibarat orang nikahan dia sudah sering sekali dari mulai Walikota, Gubernur sampai Presiden dia duduk manis selama ini. Panitianya siapa kita-kita dong yang di grassroot akar rumput kita semua yang kerja, ketika sekarang mau nganterin anaknya dia sendiri mau jadi panitia silahkan nilai sendiri. Kalau kami ingin ditakuti dengan langkah seperti itu tidak berpengaruh dengan kita (PDI Perjuangan),” kata dia.

Munculnya figur Presiden yang ikut mendukung satu paslon tidak akan berdampak bisa memenangkan Pilpres satu putaran. Tun Teja menegaskan satu suara itu kualitas tetap sama walaupun suara itu dari Jokowi sekalipun.

“Satu suara Presiden dan satu suara petani itu sama! Kita percaya masyarakat kita itu sangat menginginkan kesejahteraan tidak ingin dikekang tidak ingin pemimpin yang arogan dan tidak ingin negara ini banyak

hutang. Masyarakat sekarang sudah pintar sudah ada sosial media membuka semua hal-hal membuat mereka mengerti Bansos dibagi mereka (rakyat) paham ini duit kami kok dari pajak. Seharusnya bantuan itu diberikan sesuai dengan waktunya tidak diseret kesini (saat Pilpres),” jelasnya.

Tun Teja menyebutkan tiga periode menjawab keinginan besar Jokowi kembali ingin menjadi Presiden kejelasan terang benderang keinginannya untuk kembali memimpin Indonesia.

Namun ambisi itu tidak terwujud. Hal itu tentunya diharapkan Jokowi anaknya bisa melanjutkan ambisi tersebut. Tetapi Jokowi tidak didukung partai, ambisi itu justru berdampak buruk kepada Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai selalu mengekang keinginan Jokowi.

“Keinginan beliau dari awal tiga periode di cut ibu Mega karena tidak sesuai dengan konstitusi. Namun ibu Mega yang diserang dikatakan mengekang sering di cemooh coba saya mau tahu apa intervensi ibu Mega yang dilakukan kepada Jokowi saat ini,” tegasnya.

Dilanjutkannya adanya gaung dari paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memenangkan Pilpres 2024 hanya satu putaran bukan optimis tetapi ketakutan yang disuarakan. Termasuk juga turunnya sosok Presiden di Pilpres 2024 juga salah satu bentuk ketakutan yang ditangkap dari paslon saingannya tersebut.

Diprediksinya apabila Pilpres 2024 berjalan dua putaran. Meski paslon nomor urut 02 yakin menang satu putaran, hal itu menunjukkan rasa panik mereka.

“Sebenarnya satu putaran dia mau menang itu karena sebe-

narinya mereka pesimis kalau dua putaran akan kalah. Jadi optimis bisa menang satu putaran karena takut kalah di dua putaran,” pungkasnya.

Mayasari Kader Partai Nasdem Perwakilan Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar AMIN juga membantah adanya figur Jokowi ikut muncul di Pilpres 2024 bisa membuat kemenangan bagi paslon yang didukungnya akan berdampak kompetisi bisa berjalan singkat hanya satu putaran saja.

Terlebih lagi tiga kontestan ini belum ada yang menunjukkan survei di atas 50 persen pertama besar suara nanti tidak bulat kepada satu paslon saja.

“Saya mengakui Pak Jokowi itu politisi ulung. Dia itu berasal dari Walikota, Gubernur dan Presiden. Namun untuk sekarang kalau menurut saya tidak terlalu memberikan efek, Prabowo mendapatkan suara 45 persen ditambahkan anaknya tetapi tetap begitu-begitu saja? Faktanya survei tidak tinggi,” jelasnya.

Diakui H-1 pencoblosan Pilpres 2024 dikhawatirkan lebih kepada terjadinya kejutan yang tidak bisa diprediksi atau diduga oleh siapapun bisa membuat dampak besar kepada hasil pemilihan nanti.

Dia malah mengkhawatirkan gerakan PDI Perjuangan bisa-bisa saja tiba-tiba menggelar untuk mengubah keadaan bisa memenangkan pasangan yang diusungnya.

Kembali ditekankannya sosok Jokowi tidak akan bisa mengubah pilihan rakyat Indonesia ditakutinya itu adanya sebuah faktor x merupakan kejutan bisa berdampak kepada hal besar yang juga mengubah survei yang telah klaim oleh para paslon sebelum pemilihan.

“Pemilihan itu banyak sekali kejutannya tidak hanya faktor adanya sosok seperti Jokowi saja. Misalnya Pilgub DKI Jakarta dulu juga dua putaran putaran karena survei AHY turun disebabkan adanya konferensi pers Antasari Azhar di H-1 pencoblosan. Nah H-1 pencoblosan Pilpres ini bisa saja akan ada kejutan

apa ada dari PDI Perjuangan kita tidak tahu,” ceplosnya.

Pihaknya dari paslon nomor urut 1 memang tidak didukung oleh oligarki karena memang mengusung perubahan sistem dari pemerintah sebelumnya. Namun pihaknya tidak mempermasalahkan apabila tidak ada dukungan dari pemerintah saat ikut berkompetisi di Pilpres 2024.

“Kalau kita sebelum paslon lain mengaku dizalimi kami sudah terlebih dulu. Kami dari Nasdem sudah jauh mendukung Anies Baswedan sebelum Pilpres dan partai koalisi lain memberikan dukungan. Semenjak itu banyak hal yang kami dapatkan,” pungkasnya.

Sementara Andini Agustina, kader Partai Golkar perwakilan Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebutkan suara Prabowo Subianto sudah sangat banyak dan bisa menjadi Presiden di Pilpres sebelumnya.

Prabowo Subianto kalah akibat adanya kecurangan politik, belajar dari itu dia berharap Pilpres 2024 ini jangan sampai terjadi lagi. Kendati survei paslonnya tinggi dia khawatir kalau akan ada kecurangan-kecurangan tersebut berdampak kembali kekalahan untuk Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Sebenarnya dari dulu suara Prabowo Subianto sudah banyak karena dicurigai tadi jadi kalah. Makanya jangan sampai Pilpres 2024 dicurangi itu juga (kecurangan politik) disebutkan oleh masyarakat karena video seperti menyebutkan adanya kecurangan politik sudah banyak beredar,” ucapnya.

Soal optimis satu putaran Andini Agustina menyebutkan bukan karena munculnya sosok Jokowi saja. Baginya jargon satu putaran juga disuarakan oleh paslon lain bukan hanya mereka saja.

“Walaupun survei tinggi kami tetap kerja keras! Satu putaran paslon lain juga menyuarakan itu bukan hanya kami saja kok. Tentunya saat kampanye siapa yang tidak akan optimis ingin menang jadi sah-sah saja kalau kami mau menang satu putaran dong,” ucapnya lagi.

Menurutnya secara pribadi sosok Jokowi sangat cerdas dalam berpolitik bahkan disebut master of strategi dia menyatakan munculnya beliau juga berdampak besar kepada survei sekarang hampir 50 persen. Pihak mereka tetap berpegang teguh optimis menang satu putaran walaupun dua putaran mereka juga tidak akan takut berkompetisi.

“Pengaruh Pak Jokowi besar bahkan partai yang mengusungnya dua periode kemarin ikut naik daun. Buktinya sekarang kita lihat hasil survei tahu sendirikan jawabannya Pak Jokowi kalau dibilang saat ini berpredikat master of strategi,” ucapnya.

Menurutnya paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari hasil survei sekarang jelang pemilihan tanggal 14 Februari 2024 tidak jumawa. Pihaknya tetap bekerja keras untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

●RDR

“Semuanya kita serahkan kepada rakyat kami tidak mau juga berasa ada di atas angin. Kami tetap bekerja keras dan optimis satu putaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024,” pungkasnya. ●RDR





“Publik masih bisa mendorong institusi politik sebesar PDIP, Nasdem, PKS, PPP, dan PKB mengambil jalan tegas oposisi untuk menyelamatkan demokrasi”

Sirojudin Abbas

# BUTUH OPOSISI LAWAN JOKOWI

**Demokrasi Indonesia kini dinilai dalam kondisi mengkhawatirkan, berdasarkan sejumlah indikator. Seperti kualitas proses pemilu yang diwarnai berbagai dugaan kecurangan, dorongan pilpres satu putaran, serta pengabaian nilai-nilai etis demokrasi.**

Untuk itu, dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, mengatakan, publik bisa mendorong sejumlah partai politik untuk memainkan peran itu, terutama partai-partai yang berada di luar koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Saat situasi memanggil seperti saat ini, diharapkan ada pelembagaan oposisi yang lebih steril. Misalnya, kenapa tidak kita dorong saja PDIP dengan kekuatan yang dimiliki untuk mulai mengambil sikap jelas dalam konteks penyelamatan demokrasi Indonesia ke depan,” ujar Sirojudin dalam webinar nasional yang digelar Moya Institute bertajuk “Demokrasi Indonesia Terancam?”, Kamis, 18 Januari 2024.

Ditegaskan Sirojudin, oposisi terhadap praktik kekuasaan Joko Widodo yang mengabaikan nilai dan etika demokrasi harus dilakukan. Terlebih, belakangan ini berbagai pihak telah mendorong pemakzulan.

“Ini tanda problemnya sudah sangat serius. Publik masih bisa mendorong institusi politik sebesar PDIP, Nasdem, PKS, PPP, dan PKB mengambil jalan tegas oposisi untuk menyelamatkan demokrasi. Ini dipas-tikan akan mendapat dukun-gan dari

masyarakat sipil, mahasiswa, dan dunia internasional,” tegasnya.

Sirojudin juga menjelaskan soal politik dinasti sejatinya merupakan model politik eksklusif yang bisa menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Lebih jauh lagi, model politik ini bisa menurunkan kualitas demokrasi dan menguatnya praktik nepotisme oleh para penguasa.

“Sistem politik yang eksklusif ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara,” ujar Sirojudin.

Melihat kebijakan pemerintah saat ini, Presiden Jokowi rajin mendorong industrialisasi hingga kebijakan impor beras besar-besaran. Hal ini menurutnya, menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian.

Sementara itu, pendiri Setara Institute, Hendardi, menilai vetokrasi mengalami penguatan di era pemerintahan Jokowi, merujuk pada veto dan pemblokiran aspirasi kolektif masyarakat oleh sekelompok orang. Vetokrasi di era Jokowi belakangan malah menjadikan proses legislasi di DPR menjadi ugal-ugalan hingga meruntuhkan independensi Mahkamah Konstitusi.

Ditambahkan ilmuwan politik yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Prof Ikrar Nusa Bhakti, demokrasi Indonesia semakin terancam sejak Jokowi tanpa malu-malu memajukan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres. Hal tersebutlah yang menjadikan Pilpres 2024 sebagai pesta demokrasi terburuk di era Reformasi.

“Adanya pembajakan oleh Jokowi dan keluarganya, melalui rekayasa hukum di MK dan berlanjut rekayasa politik, menjadikan 2024 ini akan tercatat sebagai pemilihan umum terburuk dalam sejarah Indonesia atau paling tidak pemilu paling tidak

demokratis,” ungkapnya.

Untuk itu, Ikrar menaruh harapan kepada pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, untuk memperbaiki regresi demokrasi dan hukum saat ini.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, juga memberikan penilaian bahwa proses pemilu 2024 adalah yang paling buruk dibandingkan pemilu sebelumnya. Bukan tanpa alasan, JK menyinggung pemilu saat ini terlihat demokratis, tapi ada intimidasi terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Menurut JK, intimidasi tersebut adalah bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu karena ada keberpihakan kepada calon tertentu.

“Saya umur segini mengalami pemilu sejak lama. Enggak ada proses pemilu seburuk ini. Paling buruk,” kata JK di sebuah tayangan YouTube, Kamis, 23 Januari 2024.

JK mengingatkan agar semua pejabat pemerintah, termasuk presiden agar netral dalam politik. Termasuk, saat masa Pilpres 2024 yang saat ini bergulir.

Menurut dia, netralitas itu merupakan bagian dari integritas seorang presiden serta bagian dari sumpah yang disampaikan saat menjabat untuk bersikap adil kepada semua masyarakat, termasuk dalam pilihan politik.

“Saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Itu dimulai dengan (pernyataan), ‘Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,’” ujar JK.

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Jika itu dilanggar, maka ada sanksinya yakni sumpah maupun

aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadi seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, (kalau) tidak adil itu melanggar sumpahnya. Jadi (kena sanksi) dua, kena Allah dan kena UUD, ya,” tutur JK.

Meski begitu, JK enggan mengomentari soal netralitas Presiden Jokowi dalam pilpres 2024. Ia lebih memilih melihat pernyataan Jokowi yang selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan agar aparat TNI-Polri tetap netral.

“Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya,” ucap dia.

## Harus Ada Oposisi

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengaku siap jika harus menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang. Hal itu disampaikan Muhaimin saat menyampaikan visi-misi di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin, 4 Desember 2023.

Mulanya, seorang panelis bernama Charles bertanya apakah PKB siap menjadi oposisi jika kalah dalam Pilpres 2024. Mengingat, PKB menjadi parpol koalisi pemerintah sejak pemerintahan SBY maupun Jokowi.

“Kalau seandainya kalah, mau enggak jadi oposisi yang kritis, konstruktif?” kata Charles.

“Oposisi itu pekerjaan mulia, oposisi itu orang mulia yang harus ada untuk mengontrol, meluruskan jalan supaya tidak salah,” ujar Muhaimin.

Ia menuturkan, PKB tak masalah jika akhirnya harus berada di luar pemerintahan. Justru, kata Muhaimin, PKB ingin merasakan posisi itu setelah hampir 20 tahun menjadi parpol koalisi pemerintah.

“Jadi, saya tentu saja amat sangat siap menjadi oposisi karena belum pernah merasakan oposisi, ingin tahu rasanya,” kata dia.

Cak Imin menceritakan, saat ini PKB kerap dianggap sebagai oposisi setelah bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal, sebelumnya PKB sempat tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra.

“Jadi itulah faktanya, yang perlu kita pahami, bahwa pada dasarnya, oposisi itu pekerjaan penting,” ujar Muhaimin.

•RDO



“Tidak mungkin merupakan suatu kekuatan gotong royong anggotanya, orang jumlah baliho disinyalir alat kampanye lebih banyak dari pada jumlah anggotanya”

*Hasto Kristiyanto*



# PSI TANTANG PDIP

**Tensi politik jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024 makin panas antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan PDIP. Dalam beberapa waktu belakangan, dua partai warna merah ini terus saling melemparkan sindiran keras.**

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, merespons pernyataan politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, yang menyebut PSI beruntung karena memiliki putra bungsu Jokowi di partainya. Kaesang sendiri menyebut tak hanya PSI yang beruntung, namun PDIP juga beruntung.

“Ya sama-sama beruntung,” ucapnya di Lapangan Jetak Purwanto, Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa, 6 Februari 2024.

Ia menyebut PDIP beruntung karena memiliki Presiden Joko Widodo di partainya. “PDIP juga punya Pak Presiden di partainya,” ujarnya.

Sebelumnya, Hendrawan Supratikno merespons bahwa pengusung pasangan Prabowo-Gibran kini sibuk berebut Jokowi.

“Semua partai pengusung Paslon 02 sibuk berebut Jokowi. Kami sibuk merebut hati rakyat,” kata Hendrawan.

Menurutnya, PSI beruntung karena putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi Ketum di partainya. “PSI beruntung karena Ketum-nya anak kandung Jokowi sehingga bisa berselogan Partainya Jokowi,” ujarnya.

Kaesang juga menyinggung pemberian bansos yang dianggapnya korup saat pandemi lalu. “Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, dan bansos itu harus tepat waktu,” ujar Kaesang usai menghadiri debat kelima pilpres di JCC, Senayan, Jakarta, 4 Februari 2024.

“Mungkin saat ini (pembagian bansos) dipermasalahkan. Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat (pandemi) COVID-19 dikorupsi,” tegasnya.

Pada akhir Januari 2024, Kaesang juga menyuarakan masyarakat untuk memilih PSI dan mencoblos Prabowo-Gibran. Namun dalam orasinya, selain meminta pendukungnya mencoblos PSI dan Prabowo-Gibran, Kaesang juga memberikan sindiran pada PDIP.

“Yang penting tanggal 14 Februari jangan lupa ke TPS nyoblos PSI. Merahnya sama tapi beda. Yang ini ketua umumnya masih muda, masih semangat. Saya juga enggak berkumis, kumis saya sedikit,” kata Kaesang.

Kaesang melanjutkan orasinya dengan meminta massa me-

milih pasangan Prabowo-Gibran. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini meminta massa pendukung PSI berjanji untuk memilih partainya dan Prabowo-Gibran.

Kaesang juga mengatakan partainya membuka pintu lebar-lebar bagi Presiden Joko Widodo untuk bergabung ke dalam partai yang dipimpinnya. Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, yang mengatakan bahwa sudah tidak lagi menganggap Jokowi sebagai kader partai banteng.

“Kami membuka lebar (kesempatan) bagi Pak Presiden (Jokowi) untuk bergabung,” kata Kaesang.

Terkait kepastian status Jokowi di PDIP, Kaesang mengatakan hal itu adalah urusan ‘dapur’ partai masing-masing.

“Itu kan kembali lagi ke mereka (PDIP Perjuangan). Itu kan urusan dapurnya partai lain. Saya tidak mau ikut campur,” sambungnya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi pernyataan Kaesang Pangarep yang menyindir balik terkait kasus korupsi program bansos yang dibagikan saat pandemi Covid-19, malah dikorupsi kader PDIP Juliari Batubara.

Menurut Hasto, kasus yang menjerat eks menteri sosial itu sudah diproses hukum. Sehingga, masalah itu sudah selesai ditangani aparat penegak hukum.

“Hukumannya sudah ada, sudah ada proses hukumnya, tidak ada perlindungan, dan nggak ada fungsi-fungsi elektoral, nggak ada intervensi kami terhadap proses hukum,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.

Dia juga menyebut, tidak ada intervensi hukum dalam kasus Juliari tersebut. Menurut Hasto, hal tersebut berbeda dengan politisasi bansos saat ini yang digunakan pemerintah Joko Widodo untuk kepentingan elektoral pada Pilpres 2024.

Hasto pun balik me-

nyindir keuangan PSI yang pernah salah memasukkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU. PSI memiliki laporan keuangan yang mencurigakan.

“Ini mumpung sebelum di-clear up, kita hitung lalu kita kalikan, dari mana dananya itu. Itu sudah menyangkut masalah etik dan hukum, karena pelanggaran terhadap laporan keuangan,” ujar Hasto.

Dia pun heran, bagaimana PSI bisa memasang baliho dalam jumlah banyak. “Tidak mungkin merupakan suatu kekuatan gotong royong anggotanya, orang jumlah baliho disinyalir alat kampanye lebih banyak dari pada jumlah anggotanya,” kata Hasto menyentil.

Selain itu, Hasto juga menuding adanya dugaan pengerahan kepala desa di Jawa Timur untuk mencari suara bagi PSI. Hasto menyebut, satu kepala desa ditargetkan untuk mencari 100 suara di desanya. Dia mengaku, bisa mempertanggungjawabkan laporan itu berdasarkan informasi yang dikumpulkan kadernya di lapangan.

Menurut Hasto, saksi yang melaporkan indikasi pengerahan kepala desa tersebut sudah dilindungi dan tak akan pernah diungkapkan. Ini kan perguruan tinggi kan bergerak di seluruh Indonesia secara masif.

“Artinya, dengan gerakan para intelektual, para

cendekiawan, para budayawan, dalil dari Mas Kaesang itu tidak tepat,” ujar Hasto.

Di samping itu, ia juga mengungkap sejumlah indikasi adanya tekanan terhadap kepala daerah dan kepala desa untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Tekanan tersebut diberikan lewat ancaman hukum.

“Pertama bagi kepala desa, dikatakan bahwa kalau di Makassar ‘kalau kamu masih mau tidur sama istri kamu tidak? Kalau tidak, akan diproses hukum’. Kalau tidak mau mendukung padangan 02,” ujar Hasto.

Kedua, adanya tekanan yang didapatkan oleh Bupati Gresik yang juga kader PDIP, Fandi Akhmad Yani alias Gus Yani, yang tiba-tiba mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Menantu KH Agoes Ali Masyhuri alias Gus Ali itu mengikuti jejak mertuanya untuk mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Gus Yani bersama Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor terlihat menghadiri acara deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran di Pondok Pesantren Bumi Shalawat, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 1 Februari 2024. Menurut Hasto, Gus Yani mendukung Prabowo-Gibran karena tekanan.

“Modus yang ketiga bahwa ada pengaduan masyarakat kalau tadi top down, kalau ini pengaduan dari masyarakat terhadap kepala-kepala daerah. Lalu dengan pengaduan masyarakat itu dijadikan sebagai alat rekam,” ujar Hasto.

Terakhir, Hasto menuding, adanya mobilisasi kepala desa di Jawa Tengah untuk mendukung Prabowo-Gibran. Padahal netralitas kepala desa sudah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Dia juga menjamin, informasi yang disampaikan valid.

“Karena yang menyalahgunakan kekuasaan rakyat bukan hanya melanggar hukum, tapi local wisdomnya itu. Pelanggaran terhadap suatu hal yang sangat prinsip dampaknya bisa tujuh turunan,” ungkap Hasto. ●

RDO





“Formasi elektabilitas para kandidat masih bersifat dinamis dan dapat mengalami pergeseran”

Usman Lamreung

# MEMBELI KUCING DALAM KARUNG

**Banyak tokoh dan politisi telah mencuat dan bahkan secara terbuka menyatakan keinginan untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh pada tahun 2024.**

Fenomena ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam ranah demokrasi di Aceh, memberikan harapan akan munculnya pemimpin terbaik yang dapat memimpin pembangunan daerah ini, yang saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Pengamat sosial dan politik dari Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung mengatakan sejumlah tokoh telah mencuat sebagai potensial kandidat dalam kontestasi Pilkada Aceh mendatang.

Beberapa nama yang telah muncul antara lain Abdullah Puteh, Nasir Jamil, Muzakir Manaf, Sudirman atau Haji Uma, dan mantan Walikota Banda Aceh Aminullah Usman.

Selain itu, hasil survei juga menyebutkan beberapa nama lain seperti Tarmizi Karim, Yusuf A. Wahab atau Tu Sop, Muhammad Nazar, dan beberapa tokoh lainnya.

Berdasarkan hasil survei elektabilitas, Nasir Jamil tampak menempati posisi puncak, diikuti oleh Haji Uma, Muzakir Manaf, Tarmizi Karim, dan Tu Sop yang masuk dalam lima besar dengan tingkat elektabilitas tertinggi.

“Formasi elektabilitas para kandidat masih bersifat dinamis dan dapat mengalami pergeseran,” ungkapnya.

Usman Lamreung juga menyoroti bahwa kandidasi gubernur Aceh dan hasil Pilkada 2024 nanti akan sangat menentukan masa depan Aceh dalam lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penilaian terhadap kandidat tidak hanya boleh dilihat dari angka elektabilitas semata, tetapi juga dari perspektif kepentingan calon gubernur dan wakilnya serta kepentingan rakyat sebagai pemilih.

Para calon diharapkan memahami bahwa elektabilitas menjadi fokus utama mereka untuk meraih kursi kepala daerah.

Namun, di sisi rakyat, kepentingan mereka adalah mendapatkan pemimpin yang kompeten dan visioner, yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka.

“Dalam konteks ekspektasi Aceh menjadi lebih baik, kandidasi gubernur Aceh tidak bisa dilihat semata-mata dari angka dan persentase elektabilitas belaka,” tegas Usman Lamreung.

Terlihat bahwa kebanyakan dari

mereka hanya mengandalkan popularitas, kekuatan mesin politik, dan hasil survey untuk membangun citra elektabilitas mereka.

Aminullah Usman adalah salah satu yang tampil cukup elegan dan percaya diri saat mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur. Ia juga mempublikasikan visi misinya kepada publik, memberikan langkah yang seharusnya diikuti oleh calon lainnya.

“Meskipun narasi visi-misinya masih dapat dikritisi, pendekatan seperti yang dilakukan oleh Aminullah seharusnya diadopsi oleh calon lain agar publik dapat menilai kapasitas intelektual mereka dalam memimpin Aceh ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Di sisi lain, calon seperti Nasir Jamil masih menggunakan strategi standar dengan pertemuan-pertemuan simpatik dan menunjukkan keberpihakan terhadap isu-isu tertentu.

Namun, kemunculan nama-nama calon Gubernur Aceh ini masih kabur. Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah secara terang-terangan mengusung kandidatnya untuk Pilgub 2024, yaitu M. Nasir Djamil.

Usman Lamreung menyatakan bahwa dari nama-nama calon yang telah muncul, belum terlihat adanya gagasan yang menarik untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Aceh, termasuk masalah kemiskinan.

Usman Lamreung menyebut bahwa gerak-gerik para calon saat ini masih terbatas pada kegiatan seremonial dan kegiatan sosial lainnya.

“Mereka belum berani secara tegas menyampaikan visi-misi mereka kepada publik,” ungkapnya.

Dengan demikian, Usman menyimpulkan bahwa para calon yang muncul belum memiliki gagasan yang konkret, konsep yang matang, atau ide-ide kreatif.

Usman Lamreung juga menekankan pentingnya para calon gubernur ini untuk mengungkapkan dengan jelas visi dan misi mereka kepada masyarakat Aceh, sehingga masyarakat dapat memahami dasar dari pencalonan mereka sebagai Gubernur Aceh.

Kekhawatiran muncul jika calon-calon tersebut tidak mampu mengungkapkan tujuan, gagasan dan visi mereka dengan jelas, karena hal ini dapat menyebabkan situasi di mana masyarakat hanya “membeli kucing dalam karung” dalam pemilihan kepala daerah.

“Berbagai masalah yang masih belum terselesaikan di Aceh, terutama masalah kemiskinan, yang tidak bisa diabaikan karena memiliki dampak dari lima tahun sebelumnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia mendesak para calon untuk memiliki gagasan yang jelas, konsep yang solid dan rencana yang kuat dalam menangani masalah-masalah tersebut dan membawa Aceh ke masa depan yang lebih baik.

“Padahal di antara mereka ada yang sudah pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode yang lalu, seperti Abdullah Puteh dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Jika dilihat mereka ini punya potensi lebih, namun sampai detik ini tidak terlihat gagasan yang konkret,” ulasnya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, H Nasir Djamil, telah mengumumkan kesiapannya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 mendatang.

Nasir Djamil menegaskan langkah politiknya untuk ikut dalam Pilkada Aceh merupakan hasil pertimbangan matang, telah mendapatkan restu dari keluarga dan teman-teman. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keyakinannya bahwa pengalaman sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode menjadi modal berharga dalam kepemimpinan Aceh di masa mendatang.

“Kami yakin dengan pengalaman pernah jadi anggota DPR RI beberapa periode menjadi modal bagi kami dalam memimpin Aceh ke depan,” ujarnya.

“Kedepan kita terus mendorong dan mengawal kebijakan Pemerintah Pusat memihak kepada Aceh.”

Nasir Djamil juga menambahkan bahwa setelah Pilkada Aceh, ia berencana mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR RI. Ia meminta doa dan dukungan dari masyarakat Kota Langsa.

“Insya Allah, bila dipercayakan saya siap memimpin Aceh dimasa yang akan datang,” tambahnya. ●IRY



“Hingga saat ini, Sutan Riska sendiri belum banyak memberikan komentar. Hanya saja, untuk langkah selanjutnya akan sesuai dengan arahan partai”

Alex Indra Lukman



# PDIP MAJUKAN SUTAN RISKHA HINDARI KEKALAHAN DI SUMBAR

**Sutan Riska Tuanku Kerajaan, disebut-sebut tengah dipersiapkan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumbar) periode 2024-2029.**

Indikasi keinginan Sutan Riska untuk maju dalam Pilgub muncul ketika namanya tidak tercantum dalam daftar Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sumbar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Sutan Riska sedang menjalankan tugasnya sebagai Bupati Dharmasraya.

Jika PDIP tetap memutuskan untuk mendorong Sutan Riska maju sebagai Gubernur Sumbar, partai tersebut perlu mempertimbangkan untuk berkoalisi dengan partai lain atau mungkin hanya menempatkannya sebagai calon Wakil Gubernur (Wagub).

Hal ini dikarenakan PDIP merupakan partai minoritas di Sumbar setelah mengalami kekalahan pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, dampak dari polarisasi politik.

Hasto menyebut kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi dan pemicu perubahan di internal PDIP.

Salah satu langkah perubahan yang diambil oleh PDIP untuk menghindari kegagalan serupa di Pemilu 2024 adalah dengan mengadakan kegiatan bertajuk ‘Pekan Pemikiran Bung Hatta’. Dalam kegiatan ini, PDIP menggali pemikiran tokoh-tokoh seperti KH Agus Salim, M Natsir, dengan fokus pada integralitas Sumbar.

“Pendekatan kebudayaan sangat penting. Kami mengangkat beberapa aspek penting dari Ranah Minang ini, semua kami gali,” ungkap Hasto.

Bagi PDIP, konsep utama adalah kerjasama menuju masa depan. Meskipun keputusan akhir ada di tangan masyarakat, PDIP berusaha melakukan pendekatan khusus dengan melibatkan tokoh-tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Fatmawati dan Puan Maharani yang memiliki akar sejarah di Minang.

Hasto juga menyoroti bahwa Presiden Joko Widodo, meskipun kalah dalam dua pemilu di Sumbar, tetap memperlakukan semua warga setara tanpa membedakan pilihan politik mereka.

“Ini dianggap sebagai modal penting bagi PDIP dalam memperlakukan semua warga setara tanpa memandang pilihan politik,” tambahnya.

Meskipun demikian,

Hasto menegaskan bahwa kunjungannya ke Kota Padang tidak hanya terfokus pada perolehan kursi bagi partainya, baik di legislatif maupun eksekutif.

“Kami datang ke Padang tidak pernah berfikir kami dapat kursi atau tidak, yang penting kami banyak menggali pemikiran tokoh bangsa yang lahir di Ranah Minang ini,” ulasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman, menyatakan fokus partainya saat ini adalah memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

“Saat ini fokus PDIP adalah memenangkan Pileg dan mendukung Capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024,” ungkapnya.

Alex mengungkapkan bahwa secara pribadi, ia telah mengajak Sutan Riska untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI dari Sumbar.

Namun, ia juga mengakui bahwa Sutan Riska mungkin memiliki cita-cita politik yang berbeda, dan partai akan memfasilitasi kader sesuai dengan aspirasinya.

Menurut Alex, hubungan di antara kader-kader PDIP dibangun dalam suasana kekeluargaan, dan langkah politik Sutan Riska pada Pemilu 2024 akan dipertimbangkan oleh partai.

Ia menilai bahwa Sutan Riska telah memberikan kepemimpinan yang sukses selama dua periode di Dharmasraya, termasuk dipercayakannya Sutan Riska sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Terkait rumor langkah politik Sutan Riska sebagai calon gubernur Sumbar pada Pilgub 2024, Sutan Riska sendiri tidak memberikan banyak komentar. Ia me n y a - t a k a n bahwa langkahnya akan

sesuai dengan arahan dari partai.

“Hingga saat ini, Sutan Riska sendiri belum banyak memberikan komentar. Hanya saja, untuk langkah selanjutnya akan sesuai dengan arahan partai,” kata dia.

Alex menegaskan bahwa partai akan memikirkan langkah politik Sutan Riska lebih lanjut, tetapi saat ini fokus pada Pileg dan Pilpres. DPD PDIP P Sumbar telah mendaftarkan 65 bakal calon legislatif (Bacaleg) untuk Pemilu 2024, dan Alex berharap dukungan masyarakat Sumbar untuk PDIP dalam kontestasi tersebut.

Ia juga berharap agar suasana politik di Sumbar tetap kondusif selama pemilu, seperti dalam kontestasi sebelumnya.

Meskipun demikian,

mikian, sebagai Sekretaris DPD PDIP Perjuangan Sumbar, Sutan Riska belum didaftarkan sebagai bacaleg untuk Pemilihan Legislatif 2024 DPR RI Dapil Sumbar.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Andri Rusta menyatakan bahwa terdapat peluang besar bagi Sutan Riska untuk diusung oleh PDIP Perjuangan dalam Pilgub Sumatera Barat 2024.

Sutan Riska dinilai sukses dalam dua periode kepemimpinannya sebagai Bupati Dharmasraya.

Meskipun begitu, Andri Rusta juga menyebut kemungkinan lain, yakni Sutan Riska bisa saja maju sebagai bacaleg DPRD Sumatera Barat dari Dapil VI pada Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, PDIP Perjuangan tidak ingin kehilangan kursi DPRD Sumatera Barat dari basis suaranya di Dharmasraya, terutama dengan Leli Arni yang kini mencalonkan diri sebagai bacaleg DPR RI dari PDIP.

“Potensi tersebut ada, PDIP Perjuangan tentu tak ingin kehilangan kursi DPRD Sumbar dari basis suaranya di Dharmasraya, mengingat Leli Arni kini menjadi bacaleg DPR RI dari PDIP,” kata Andri Rusta.

Andri Rusta menekankan bahwa kursi yang akan ditinggalkan Leli Arni di Dapil VI Pileg Sumbar tidak mungkin dilepas oleh PDIP Perjuangan.

Oleh karena itu, Sutan Riska bisa menjadi sosok yang diusung untuk menggantikan Leli Arni, mengingat basis suaranya di Dapil VI mencakup daerah Sijunjung, Tanah Datar, Dharmasraya, Sawahlunto, dan Padang Panjang. • IRY





“Tentu, kami berharap kerjasama seluruh lapisan masyarakat, partai politik, dan pihak terkait untuk ber-satu dan bekerja keras”

Junaidi

# INFO PILKADA

Minggu I • Februari 2024

17

## JANGAN ADA KETIDAKSETARAAN PEMBANGUNAN DI KALTENG

**Nadalsyah telah memas-tikan pencalonannya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.**

**S**elaku Ketua Umum Partai Demokrat Kalteng, H. Nadalsyah menegaskan, surat penugasan resmi DPP Partai Demokrat yang ditujukan kepadanya sebagai Pengurus Daerah (DPD Partai Demokrat Kalteng) secara tegas menyikapi keresahan masyarakat, keraguan mengenai pencalonan gubernurnya.

Ia mengklarifikasi, ada spekulasi mengenai pencalonannya tahun lalu, namun tidak menjadi kenyataan.

“Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dengan surat penugasan resmi dari DPP Partai Demokrat, saya (H. Nadalsyah) mengukuhkan pencalonan saya sebagai Gubernur Kalteng,” ujar Nadalsyah, Sabtu, 20 Januari 2024.

Lebih lanjut Nadalsyah menegaskan, pembahasan mengenai calon Wakil Gubernur Kalteng belum terjadi, dan belum ada informasi siapa yang akan dicalonkan untuk mendampinginya.

Ia menyampaikan niatnya untuk mengevaluasi situasi politik di Kalteng pasca pemilu Presiden dan Legislatif.

Terkait pe-

milihan calon wakil gubernur, H. Nadalsyah mengutarakan keinginan adanya kemitraan yang kolaboratif dan sinergis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah yang dikenal dengan Bumi Tambun Bungai, sebutan lain Kalteng.

“Kami mencari sosok yang bisa bekerjasama dan berkolaborasi antara calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak saling bersaing dan sebagainya. Kami mencari wakil yang bisa memotivasi, memberi masukan atas kekurangan-kekurangan Gubernur,” jelasnya.

Niat Nadalsyah untuk maju Cagub Kalteng bukan untuk Cawagub.

“Saya tidak memiliki niatan untuk menjadi bakal calon wakil gubernur, melainkan bakal calon gubernur. Jika tidak mampu menjadi bakal calon gubernur, saya lebih memilih untuk mengelola perusahaan. Jangan memberikan dukungan kepada saya sebagai bakal calon wakil gubernur,” ucap Nadalsyah.

Bupati Barito Utara ini mengakui bahwa dirinya terus melakukan sosialisasi, termasuk di Kotawaringin Timur.

Selain karena kabupaten ini memiliki jumlah pemilih terbesar di Kalteng, Nadalsyah merasa Kotawaringin Timur sebagai rumah kedua baginya, terutama karena diterima dengan baik oleh masyarakat.

Pada tahun 2019, ia pernah melakukan sosialisasi, namun pada saat itu, niatnya untuk ikut dalam Pilkada dibatalkan. Beberapa alasan yang dia kemukakan termasuk baru satu tahun menjabat sebagai bupati, belum adanya persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat, dan keluarganya yang meminta untuk menyelesaikan tugas di daerah.

“Tidak ada alasan untuk membatalkan pada pemilu 2024. Mohon doa semoga saya diberikan umur panjang dan kesehatan. Insyaallah, saya siap maju dan berkontribusi untuk menciptakan sejarah kemajuan di Kalteng,” ujar Nadalsyah.

Nadalsyah menyatakan bahwa ia telah menyiapkan langkah-langkah politik untuk bersaing dalam Pemilihan Gubernur 2024. Salah satu langkah tersebut adalah maju sebagai calon anggota DPR RI dari Kalteng sebelumnya.

Menurutnya, langkah ini bukan hanya untuk duduk di Senayan, tetapi juga untuk mengukur potensinya dalam Pemilihan Gubernur nantinya, dengan target meraih suara terbanyak di antara calon legislatif DPR RI lainnya.

“Parameter atau titik awalnya akan terlihat dari hasil pemilu legislatif nanti. Saya berharap perolehan suara saya tidak lebih rendah dari calon legislatif DPR RI lainnya. Jika saya di bawah mereka, bisa menjadi bahan olok-olok. Sebelum berpikir menjadi calon gubernur, saya harus memastikan kinerja saya sebagai caleg tidak kalah. Oleh karena itu, saya meminta dukungan dari seluruh kader partai, terutama di Kotawaringin Timur,” jelas Nadalsyah.

Dia menambahkan bahwa setiap bakal calon gubernur pasti memiliki visi dan misi. Menurutnya, Kalimantan Tengah harus mengejar ketertinggalan dari daerah lain dengan menetapkan target dan sistem pembangunan, terutama

ma dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, olahraga, dan lainnya.

Nadalsyah menekankan bahwa pembangunan di Kalteng harus merata, dan pemerintah provinsi harus bekerja sama dengan semua pemerintah kabupaten dan kota, mengingat bupati dan wali kota lebih memahami kondisi di daerah masing-masing.

“Tidak boleh ada ketidaksetaraan pembangunan di Kalteng. Jika saya terpilih sebagai gubernur, saya tidak akan hanya fokus membangun daerah asal saya di Barito. Semua daerah akan mendapatkan pembangunan yang merata,” tambah Nadalsyah.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalteng, Junaidi menyatakan kesiapan dan optimisme mereka menghadapi pesta demokrasi pada 14 Februari 2024, serta pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang.

Dalam rangka menjalankan mandat DPP untuk persiapan majunya Ketua Partai Demokrat Kalteng, Nadalsyah sebagai bakal calon gubernur Kalteng pada tahun 2024, Junaidi mengajak seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat Kalteng untuk bersiap-siap bersama dalam perjuangan memajukan daerah tersebut.

“Kami siap menjaga dan mendukung Nadalsyah untuk maju sebagai bakal calon gubernur Kalteng. Tentu, kami berharap kerjasama seluruh lapisan masyarakat, partai politik, dan pihak terkait untuk bersatu dan bekerja keras,” ujarnya.

Junaidi juga menekankan perlunya doa restu dari DPD Partai Demokrat Kalteng serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang agar Nadalsyah dapat terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Kalteng, serta dirinya sendiri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalteng dari daerah pemilihan Kalteng I.

“Kami juga mengajak semua calon legislatif Partai Demokrat di daerah pemilihan Kalimantan Tengah II, Kalimantan Tengah III, Kalimantan Tengah IV, dan V, baik yang sedang menjabat maupun calon baru, bersatu dalam perjuangan ini,” tegasnya.

Menurut Junaidi, jika jumlah kursi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Kalteng mencukupi untuk mengusung Nadalsyah sebagai bakal calon gubernur Kalteng pada tahun 2024, hal tersebut akan memberikan semangat dan optimisme tambahan untuk mewujudkan kepemimpinan H. Nadalsyah sebagai pemimpin di Bumi Tambun Bungai.

“Kami tidak akan melupakan pentingnya komunikasi dan silaturahmi politik dengan partai-partai sahabat di Kalteng, sebagai langkah persiapan untuk membentuk koalisi sesuai dengan arahan DPP Partai Demokrat sebelumnya,” tutupnya. ●RDO

“Pernyataan sikap ini merupakan komitmen dan cita-cita serta tekad bersama agar Pilpres itu bisa dilaksanakan dengan damai dan sukses”

*Agus Fatoni*



# PNSB DEKLARASI PILPRES DAMAI 2024

**Pengurus Persaudaraan Nusantara Sumsel Bersatu (PNSB) mendeklarasikan pernyataan sikap Pemilihan Presiden (Pilpres) damai 2024, hal itu mendapat apresiasi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni.**

Agus Fatoni mengungkapkan, pernyataan sikap Pilpres damai dari PNSB ini adalah kegiatan yang positif, menunjukkan komitmen masyarakat.

PNSB sendiri diketuai oleh Syahrial Oesman yang berisi organisasi-organisasi seluruh suku yang ada di Indonesia yang berdomisili di Sumsel.

“Pernyataan sikap pilpres pemilu ini sangat positif dan ini menunjukkan komitmen masyarakat. Saya memberikan apresiasi kegiatan ini sudah cukup bagus yang di Ketua oleh Pak Syahrial Oesman, artinya seluruh masyarakat sudah menyatakan ini,” ucap Fatoni.

PNSB ini adalah perwakilan masyarakat nusantara yang ada di Sumsel.

Menurutnya, gerakan ini bukanlah gerakan elit melainkan komitmen dan cita-cita bersama agar Pilpres 2024 dapat berlangsung damai.

“Jadi ini bukan gerakan elit tapi gerakan yang mewakili suku dan adat yang ada di Sumsel. Pernyataan sikap ini merupakan komitmen dan cita-cita serta tekad bersama agar Pilpres itu bisa dilaksanakan dengan damai dan sukses dan ini menjadi kewajiban kita bersama,” ungkap Fatoni.

Fatoni juga mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menjaga hidup guyub, rukun, aman dan damai sehingga dapat mempertahankan predikat zero konflik di Sumsel.

Pasalnya, kata dia, Sumsel merupakan rumah bersama dan perlu kersamana semua pihak untuk menjaganya.

“Kita semua tinggal di Sumsel dan ini harus kita jaga dan pelihara. Apapun sukunya kita tinggal di Sumsel dan ini rumah kita bersama maka kita jaga bersama-sama. Sumsel ini besar, Sumsel ini induk dari Sumbagsel, Sumsel juga menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya artinya dari sisi sejarah Sumsel itu sudah hebat dan ini kita pertahankan,” jelas Fatoni.

Kemudian, Fatoni mengajak mereka yang tergabung organisasi PNSB agar merawat adat dan budayanya masing-masing namun tetap membangun citra Sumsel yang sudah bagus.

Dia juga meminta PNSB untuk terus mendukung pemerintah dalam membangun Sumsel yang lebih maju.



Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumsel masa Jabatan 2003-2008 sekaligus Ketua Umum PNSB H Syahrial Oesman mengatakan perwakilan ataupun ketua paguyuban dari Aceh hingga Papua menyatakan sikap Pilpres damai 2024. Hal ini dilakukan guna menghindari perpecahan satu sama lain.

“Kami semua para perantaraan akan tetap selalu menjaga zero konflik bahkan dari dulu sampai saat ini,” kata Syahrial.

Menurutnya, pernyataan sikap Pilpres Damai 2024 untuk meyakinkan bahwa masyarakat dari berbagai adat budaya di Sumsel siap menjaga zero konflik dalam Pilpres, termasuk siap mendukung program Pj Gubernur Agus Fatoni. Tak hanya itu, PNSB juga akan meningkatkan syiar kebudayaan.

Turut hadir, Ketua Komisi I DPRD Provinsi sekaligus Ketua PNSB Banyuasin Antoni Yuzar, Rektor Stisipol Chandradimuka sekaligus Ketua Lampung SAI Sumsel Hj Lishapsari, Penasehat Persaudaraan Sumsel Bersatu Nazarudin, Sultan Palembang Darusalam sekaligus Ketua Paguyuban Zariat Sultan Iskandar Mahmud Badarudin.

Tidak hanya itu, sebelumnya Agus Fatoni mengatakan pihaknya optimis penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berlangsung damai dan aman.

Hal itu disampaikan usai penandatanganan Damai Pemilu 2024 bersama Perwakilan Partai Politik (Parpol) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),

beberapa waktu lalu.

“Deklarasi Damai Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan wujud, tekad dan juga cita-cita kita bersama agar pemilu 2024 dilaksanakan dengan aman, nyaman, damai dan sukses,” ujar Fatoni.

Fatoni mengaku bersyukur hingga saat ini wilayah Sumatera Selatan tetap kondusif, aman dan damai juga



masyarakatnya penuh kehangatan.

Dia berharap nantinya agar seluruh masyarakat dapat berkontribusi mewujudkan

kan Pemilu Damai.

“Pemilu Damai merupakan harapan kita, semua itu dapat terwujud kalau kita memiliki persepsi yang sama. Dengan menjauhi praktik atau kegiatan yang menjurus menghasut fitnah serta tindakan ujaran kebencian,” kata Fatoni.

Fatoni mengajak jajaran TNI, Polri, ASN dan seluruh masyarakat Sumsel untuk menahan diri dalam bermedia sosial sehingga tidak akan termakan hoaks, ujaran kebencian dan provokasi.

“Khusus ASN tetap punya hak untuk memilih, tetapi tidak boleh terlibat politik praktis,” tegasnya.

Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mewujudkan Pemilu Damai juga ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara serentak pada tanggal 9 November 2023 lalu.

Provinsi Sumsel menjadi yang pertama se-Indonesia.

“Saya yakin dengan kekompakan dan tekad kuat, harapan masyarakat dapat diwujudkan bersama. Semoga Allah SWT Tuhan Maha Kuasa meridhoi mewujudkan pemilu damai di Sumsel,” harapnya.

Agus Fatoni juga mengingatkan seluruh pemilih pemula, khususnya siswa-siswi kelas XII SLTA se-Sumsel untuk menggunakan hak suaranya pada Pilpres, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

“Gunakan hak pilih sebaik-baiknya karena kesan pertama kita memilih itulah yang tidak akan kita lupakan. Oleh karena itu, gunakan kesempatan pertama ini dengan sebaik-baiknya,” kata Fatoni.

Fatoni menegaskan, peran generasi muda sangat penting dalam memilih pemimpin untuk masa depan bangsa, negara dan daerah.

Mengingat siswa-siswi kelas XII di Sumsel memiliki jumlah yang cukup besar yaitu 18,84% dari total pemilih di Sumsel.

“Pemilih di Sumsel ini 18,84 persen atau sebanyak 1.192.024 merupakan generasi Z atau pemilih pemula. Oleh karena itu adik-adik kalian sangat berperan dalam menentukan keberlangsungan bangsa kita satu suara dari kalian sangat berarti,” ujarnya.

Fatoni juga mengingatkan para pemilih agar tidak golput dan terprovokasi terhadap berita bohong (hoax) yang akan menimbulkan konflik di masyarakat. ●IRY



“Pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada adalah suatu kewajiban yang tak dapat ditawar”

Agus Fatoni

# AGUS FATONI PASTIKAN NETRALITAS ASN SUMSEL

**Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni menegaskan urgensi menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam konteks Pemilu dan Pilkada.**

Agus Fatoni turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024 di The Stones Hotel Bali pada hari Selasa, 6 Februari 2024.

petitif, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu dari empat besar ekonomi dunia.

Azwar menekankan keberadaan ASN yang netral dalam Pemilu 2024 sebagai bentuk kewajiban profesionalisme ASN yang memiliki tanggung jawab sebagai aparatur negara yang harus tetap profesional, bebas dari kepentingan politik, dan setia pada prinsip-prinsip keberimbangan.

Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menekankan bahwa pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Dalam SKB tersebut, BKN diberi mandat untuk membangun Sistem Berbagi

tak netralitas ASN Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Ikrar netralitas ASN dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan SA Supriono diikuti oleh Bupati/Walikota se-Sumsel dan secara daring diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Usai pembacaan deklarasi, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pakta integritas netralitas ASN secara serentak se-Sumsel.

Agus Fatoni mengapresiasi diselenggarakannya deklarasi netralitas yang diikuti 180.751 ASN serentak se-Sumsel.

Kemudian, Fatoni juga menegaskan bahwa netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada merupakan kewajiban yang harus dipegang teguh.

Sementara itu, KPU dan Bawaslu

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk terus mendukung agar pesta demokrasi di Sumsel ini berjalan dengan aman, damai dan lancar.

Menurutnya, dengan kerjasama yang baik akan mewujudkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 mendatang berjalan sukses.

“Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota serta Forkopimda pasti mendukung KPU dan Bawaslu menjalankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Sumsel agar berjalan dengan lancar. Dengan kerja sama kita yakin apa yang kita harapkan membuat Sumsel semakin maju terwujud,” kata Fatoni.

Fatoni berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik.

Dia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar



“Pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada adalah suatu kewajiban yang tak dapat ditawar,” katanya.

Sesuai dengan tema Rakor Pengawasan dan Pengendalian BKN, yakni “Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Bingkai Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia.”

Agus Fatoni bahkan berkomitmen untuk memastikan netralitas ASN guna suksesnya Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Provinsi Sumsel bersedia menjadi teladan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang damai di seluruh Indonesia.

Provinsi Sumsel sepenuhnya mendukung langkah-langkah ini dan bersedia menjadi contoh dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang sukses dan damai, dengan menjunjung tinggi netralitas ASN untuk menjaga proses demokrasi yang sehat.

“Provinsi Sumsel siap menjadi teladan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Damai di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas membuka secara virtual.

Menteri PAN-RB menyoroti pentingnya memiliki sumber daya manusia yang kom-

Terintegrasi (SBT) guna meningkatkan sinergitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN.

“Selain itu ada inovasi baru, Integrated Mutasi atau I-Mut, untuk mendukung optimalisasi digitalisasi layanan Manajemen ASN di seluruh Instansi Pemerintah” ujarnya.

Bahkan sebelumnya, Agus Fatoni memimpin langsung deklarasi secara ser-

dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu juga harus didukung penuh.

“Bupati, Walikota dan seluruh ASN telah berkomitmen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Terutama kepada ASN ini adalah atensi yang harus kita taati dan menjadi komitmen kita bersama,” ujarnya.

Oleh karena itu, Fatoni mengimbau agar

bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.

“Namanya pesta demokrasi ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan,” kata Fatoni.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ir. SA Supriono mengingatkan jajaran ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tetap menjaga netralitas menjelang tahun politik 2024.

“Di tahun 2024 akan ada dengan tiga pemilu yaitu legislatif, presiden dan kepala daerah. Kita harus bersikap netral meskipun kita juga tetap menjalankan tugas sebagai warga negara Indonesia untuk memilih,” tutur Sekda Supriono dalam amanatnya saat memimpin apel pagi gabungan yang diikuti oleh Kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) dan ASN bertempat di Kantor Gubernur Sumsel.

Dikatakan, ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sumsel harus mampu menempatkan diri pada posisi yang sesuai dengan postur yang telah dituangkan di dalam regulasi.

“Jika kita diatur untuk netral, maka wajib bersikap netral,” tambahnya. ●IRY



“Akhirnya terjun ke dunia politik, tentunya atas dukungan keluarga dan orang tua. Karena saya memiliki pemikiran yang berbeda, bagaimana seharusnya saya bisa bermanfaat bagi banyak orang”

*Mayasari Dwiseptiana*



# TANGGALKAN ASN, FOKUS NYALEG UNTUK PERUBAHAN

**Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mungkin menjadi cita-cita sebagian orang untuk berkarier, namun tidak dengan Mayasari Dwiseptiana. Wanita 35 tahun ini justru menanggalkan jabatan ASN dan fokus berpolitik.**

Dengan dukungan penuh dari keluarga, wanita berkacamata ini akhirnya bergabung menjadi kader Parta NasDem dan maju untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Sumsel 2 nomor urut 7.

Meliputi, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Prabumulih, Muara Enim, PALI, Pagaram, Empat Lawang dan Lahat.

“Saya merasa ASN bukan dunia saya dan sudah beberapa kali mencoba berkarier di pekerjaan lain, tapi tidak ada yang cocok,” katanya, saat menjadi bintang tamu Podcast Info Indonesia, Senin 5 Februari 2024.

Untuk maju sebagai Caleg, baru kali pertama bagi wanita kelahiran 9 September 1988 ini. Tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga dan orang tua.

“Akhirnya terjun ke dunia politik, tentunya atas dukungan keluarga dan orang tua. Karena saya memiliki pemikiran yang berbeda, bagaimana seharusnya saya bisa bermanfaat bagi banyak orang,” ungkapnya.

Diceritakan Mayasari, bergabung ke dunia politik mulanya tidak direncanakan, hingga tidak sengaja nyaleg dan akhirnya menemukan kecocokan dengan partai yang menaungi hingga diseriuskan dan dilanjutkan.

“Awalnya tidak sengaja masuk ke salah satu partai, tidak sengaja nyaleg dan akhirnya cocok dengan partainya, lalu diseriuskan dan lanjutkan,” sambungnya.

Secara umum, Mayasari akan fokus pada tiga bidang jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif yakni infrastruktur, pendidikan dan ekonomi.

“Nanti tergantung partai akan menempatkan pada komisi berapa. Tapi, kalau saya ingin fokus pada tiga bidang yakni infrastruktur, pendidikan dan ekonomi,” katanya.

Untuk bidang infrastruktur, Mayasari ingin mencari tahu cara kerja di kementerian. Baik dari peraturan, kebijakan dan

fungsi untuk mengawasi apa yang harus diperbaiki.

Sedangkan untuk bidang pendidikan, Mayasari membawa misi menuntaskan ketidakadilan fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan visi dan misi Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) adalah menyamaratakan fasilitas pendidikan.

“Saya memahami betul ketimpangan antara pendidikan di Sumatera dan di Jawa, fasilitas yang kita anggap terbaik didapatkan di Sumatera ternyata berbeda dengan di Jawa. Ada ketidakadilan fasilitas pendidikan di Indonesia,” jelasnya.

Secara umum, Indonesia harus melakukan investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Pasalnya, terbukti investasi SDM yang panjang, tidak akan mungkin bisa langsung dinikmati satu atau dua tahun setelah investasi secara umum, tapi akan bisa dinikmati pada lima atau 10 tahun yang akan datang.

“Investasi terbaik adalah di investasi SDM, karena akan bisa kita rasakan pada lima atau 10 tahun yang akan datang,” sambungnya.

Selanjutnya untuk bidang ekonomi yang terlalu kompleks, setiap keputusan politik selalu berhubungan dengan keputusan ekonomi. Sehingga setiap keputusan politik akan ada dampak ekonomi.

Hingga saat ini, wanita lulusan S2 Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini mengaku memiliki tantangan terberat adalah untuk memperkenalkan diri. Cara yang dilakukan adalah dengan datang ke dapil, pasang baliho, memperkenalkan diri dengan visi dan misi yang ditawarkan.

“Saat ini lebih memastikan orang yang akan

memilih kita datang ke TPS,” tegasnya.

Sementara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Mayasari mengaku pasangan Anies dan Cak Imin atau AMIN adalah pasangan yang sangat tepat untuk memimpin Indonesia dengan membawa misi perubahan.

Pasalnya, sudah saatnya untuk perubahan. Sehingga Mayasari meyakini Anies dan Cak Imin dapat menang dalam Pilpres 2024 meski harus melewati dua putaran.

“Kita yakin menang, meski dua putaran. Karena, rasanya sulit untuk satu putaran, jika masuk dua putaran, bisa jadi melawan Prabowo Gibran,” tegasnya.

Meski, diakui Mayasari pasangan prabowo Gibran adalah penantang yang berat hanya saja Anies dan Cak Imin bisa

menghadapi.

Terlebih saat debat Capres kelima atau terakhir pada Minggu 4 Februari 2024, tiga pasang Capres dan Cawapres lebih santai dan santun. Bisa jadi telah mendapat arahan oleh masing-masing konsultan.

“Debat terakhir Capres kemarin (Minggu 4 Februari 2024), semua tampak tenang dan tidak saling menyerang. Karena jika blunder sulit untuk membersihkan nama di mata masyarakat karena waktu pencoblosan semakin dekat,” jelasnya.

Baginya, sosok presiden harus memiliki skala prioritas, presiden membutuhkan tim yang solid dan paham dibidangnya.

“Sehingga dengan tim yang solid dan kuat menguasai bidangnya masing-masing bisa membawa Indonesia kepada skala prioritasnya,” sambung dia.

Terlebih untuk program makan siang gratis yang digagas oleh Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka, harus dipertimbangkan dengan matang.

Mengingat untuk menjalankan program tersebut, harus mampu mengukur kemampuan negara termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pasalnya, untuk makan siang ini tidak bisa disamakan pada setiap wilayah. Setiap daerah memiliki standar makan yang berbeda, standar gizi yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan pada setiap wilayah,” tegasnya.

Jadi untuk semua kebijakan dan program yang diambil harus mempertimbangkan skala prioritas pada masing-masing daerah. ●IRY





“Praktik kotor seperti ini harus dihilangkan karena menyengsarakan masyarakat”

Andini Agustina

INFO  
CALEG

Minggu I • Februari 2024

21

# MEMAKSIMALKAN PERAN WANITA DI DUNIA POLITIK

**Kuota 30 persen untuk kaum perempuan dalam peran politik demokrasi Indonesia secara nyata belum terpenuhi secara maksimal. Begitu juga dalam pengambilan keputusan politik masih didominasi pria namun bukan berarti kaum wanita tidak punya kemampuan yang sama.**

**M**emaksimalkan kaum perempuan khususnya di dunia politik menjadi salah satu alasan Andini Agustina untuk terjun di dunia politik. Ada beberapa contoh teladan yang dilihatnya untuk memantapkan diri sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 ini.

Di sisi lain, Andini juga aktif sebagai aktivis dengan berbagai kegiatan sosial. Salah satunya rajin turun ke lapangan bersama tim Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) dan tidak pernah lelah untuk berbagi kepada masyarakat khususnya kota Palembang.

“Kegiatan seperti ini sudah lama kami lakukan selain program pembagian sembako, kami juga menggalakan program Warung Rumah atau Warmah karena melihat warung-warung di Kota Palembang habis tergerus dengan hadirnya minimarket, yang membunuh pencarian masyarakat dan ini menjadi perhatian serius bagi kami,” urai Andini.

Andini Agustina bercerita mengapa dirinya tertarik untuk terjun ke dunia politik, salah satunya adalah ketidakadilan yang didapatkan masyarakat kecil. Contoh ketika mereka ingin memasukan anaknya di sekolah negeri, betapa sulitnya, sekarang bukan karena sistem zonasi tapi koneksi, ini yang harus dihilangkan.

“Praktik kotor seperti ini harus dihilangkan karena menyengsarakan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara ia memberanikan diri terjun ke dunia politik tidak lepas dari dukungan suami dan keluarga besar tentunya.

“Kemudian ada salah satu tokoh perempuan yang menjadi inspirasi saya untuk terjun didunia politik ini yaitu Ibu Anita Noeringhati. Dia seorang wanita yang mampu menjadi Ketua DPRD Sumsel pertama dalam sejarah di Sumsel,” kata Caleg DPRD Sumsel dari Partai Golkar ini.

Wanita enerjik ini juga mengamati soal debat Capres dan Cawapres khususnya

yang berlangsung di sesi terakhir. Dia melihat ada perbedaan karakter yang ditampilkan para kandidat termasuk dari Prabowo Subianto.

Pada debat sebelumnya mereka terlihat saling serang dengan melontarkan pertanyaan ataupun jawaban yang menohok. Namun debat sesi terakhir sangat terlihat para kontestan sepertinya menjaga argumen masing-masing, dan terkesan mencari aman untuk menjaga posisinya sekaligus untuk meyakinkan masyarakat agar tidak berpaling untuk berpindah pilihan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Andini menilai sosok Prabowo Subianto tampil cukup elegan dengan mengajak semua kontestan untuk bersamasama membangun bangsa. Hal ini tentu menjadi nilai positif bagi seluruh kader pendukung Paslon 02, Prabowo - Gibran.

“Tidak ada debat yang terkesan menyudutkan terhadap salah satu pasangan Calon Presiden, sepertinya semua Paslon ingin memberikan ke-

san terakhir pada sesi debat kemarin ingin memberikan kesan yang baik, apa yang diinginkan oleh masyarakat agar dapat memilih calon pemimpin yang sesuai dengan harapan,” tegas Ketua Srikandi Gencar ini.

Sosok Prabowo Subianto juga membawa pengaruh positif dalam sosialisasi sebagai Caleg DPRD Sumsel Dapil 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar (AAL), Sukarame, Kemuning, Ilir Timur (IT) 1, Ilir Timur (IT) 2, Ilir Timur (IT) 3, Sematang Borang, Kalidoni dan Kecamatan Sako, dengan nomor urut 3.

Menurut Andini, tentunya pasti setiap Paslon akan melakukan yang terbaik agar bisa menarik simpati masyarakat agar bisa memilih kedepannya, dan tidak meninggalkan kesan di masyarakat yang negatif.

“Seperti saling mencaci, saling merendahkan, saling mengejek terutama pada debat-debat sebelumnya, kesannya debat kemarin lebih elegan saja,” tegas perempuan ramah ini.

Pada sesi debat kemarin memang Prabowo sepertinya mengaminkan semua, baik jawaban ataupun pertanyaan yang diucapkan kedua Paslon Presiden baik dari 01 maupun dari Paslon 02.

“Prabowo tahu strategi bagaimana menghadapi lawan-lawan karena kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu merangkul lawan, dan harus dengan satu tujuan yaitu kemenangan-

gan seperti itu gambaran sosok Pranowo,” tegas perempuan berhijab ini.

Menurut dia, sah-sah saja ketika calon presiden mau meneruskan program para pemimpin sebelumnya, seperti halnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), karena sekali lagi ketika kebijakan maupun program yang diambil itu positif mengapa tidak.

“Jakarta sudah terlalu padat dan sudah tidak layak untuk menjadi ibu kota negara, dan sistem pemerintahan harus segera dipindahkan tujuannya untuk pemerataan. Ketika perjalanannya maupun pembangunannya belum selesai, tidak ada salahnya jika nanti Pak Prabowo terpilih menjadi Presiden akan meneruskan pembangunan IKN,” ungkapnya menggebu-gebu.

Bahkan dengan program pembangunan IKN yang digagas Presiden Joko Widodo bukan hanya Prabowo dan Gibran saja yang setuju, pasangan Calon Presiden 03 Ganjar Mahfud pun ikut setuju untuk meneruskan pembangunan IKN kedepannya.

“Setiap warisan itu pasti ada pro dan kontranya, jika dinilai program warisan yang positif tidak ada salahnya jika kita ingin meneruskan tapi jika dinilai Negatif ya jangan di ikuti. Tujuan Presiden Jokowi membangun IKN adalah untuk pemerataan serta melihat jangka panjang kota Jakarta yang semakin hari semakin padat, belum lagi kondisi Jakarta yang sering banjir akibat air laut pasang. Hingga kini permasalahan tersebut belum bahkan tidak terselesaikan, berdasarkan kajian dan saran dari ahli penataan perkotaan mungkin Pak Jokowi mengambil Sikap untuk memindahkan Ibu Kota Jakarta ke IKN,” tegasnya.

Saat sesi debat kemarin Prabowo juga menyikapi permasalahan kurangnya tenaga kesehatan (Nakes) bahkan dalam statemennya Prabowo bercerita ketika datang ke Atambua di Tiga Kabupaten hanya memiliki satu orang dokter, ini kan harus menjadi perhatian serius.

Minimnya tenaga kesehatan itulah yang menjadi permasalahan dan Prabowo. Dalam programnya menyiapkan 10 ribu tenaga kesehatan yang akan diberangkatkan untuk studi di luar negeri, dan ini harus didukung. Terkait mekanismenya apakah Nakes diberangkatkan atau mendatangkan tenaga pengajar ke Indonesia itu tergantung dengan perhitungan

Namun keputusan Prabowo itu setidaknya dapat membuka mata hati masyarakat bahwa negara ini sangat kekurangan tenaga kesehatan ini harus menjadi perhatian serius,” cetusnya.

“Saya juga mohon dukungannya untuk mencoblos nama Andini Agustina dengan nomor urut 3 Calon Legislatif (Caleg) DPRD Sumsel dari Partai Golkar, sekali lagi jangan lupa coblos Andini Agustina Nomor Urut 3 Caleg DPRD Sumsel dari Partai Golkar,” tuturnya. ●RDR





# AWASI PELANGGARAN DI MASA TENANG

**Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini sedang mempersiapkan strategi pengawasan di masa tenang. Hal ini mengingat tiga hari masa tenang sebelum pemungutan suara, lebih krusial terjadi kecurangan pemilu.**

**K**etua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan salah satu strategi Bawaslu dalam pengawasan hari tenang yaitu penertiban alat peraga kampanye (APK). Terkait itu Bagja menjelaskan, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan jauh-jauh hari untuk bekerja sama melakukan penertiban.

“Dalam pengawasan masa tenang, kami (Bawaslu) sudah berkoordinasi dengan stakeholder (Satpol PP seluruh Indonesia) dan pihak yang berwenang untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK),” kata Bagja dalam Konferensi Nasional Indonesia Memilih Mewujudkan Pemilu Demokratis dan Berkualitas, Minggu, 4 Februari 2024.

Menurut Bagja, walaupun penertiban APK masuk ranah Bawaslu, namun tidak semua hal dapat Bawaslu tangani sendiri tanpa bantuan pemangku kepentingan setempat. Dia mencontohkan, penertiban APK di lahan milik pemda/pemkot dan juga penertiban di tempat yang pengawas pemilu tidak memiliki keahlian untuk menertibkannya.

“Penertiban APK sebenarnya adalah tugas kita bersama, tapi sayangnya baik KPU dan Bawaslu tidak pernah diberi pelatihan naik pohon dan sebagainya, maka dari itu harus dikoordinasikan dengan Satpol PP dan aparat yang berkaitan dengan penertiban APK,”

ungkap Bagja.

Strategi pengawasan di masa tenang lainnya, ucap Bagja, potensi terjadi mobilisasi masa dan politik uang dari peserta pemilu ataupun tim suksesnya.

“Masa tenang adalah masa di mana peserta politik tidak bisa lagi melakukan kampanye, jadi Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu yang melakukan kegiatan di masa tenang,” ucapnya.

Bagja mengapresiasi adanya konferensi nasional ini. Pasalnya, kehadiran konferensi ini membantu tugas Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu 2024.

“Saya apresiasi forum ini, ke depan sebelum memasuki pungut hitung kita perlu mengadakan kembali konferensi nasional bersama pemantau pemilu untuk saling

sharing pemantauan pemungutan suara,” ujarnya.

Rektor Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD), Masykurudin Hafidz, mengatakan, secara khusus konferensi ini bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu bentuk komitmen dari APD adalah berpartisipasi dan berkontribusi dalam integritas penyelenggaraan pemilu dengan diwujudkan dalam kebersamaan yang solid.

“Kita (APD) akan membuat ‘komitmen Indonesia’ yang berisi tentang pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas,” tegasnya.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengungkapkan, meminta jajaran Bawaslu Bali untuk melakukan persiapan penertiban APK untuk masa tenang.

“Pastikan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Bali melakukan rakor (rapat koordinasi) tentang penertiban APK dalam waktu dekat sebelum masa tenang,” ungkap Lolly dalam Rakornas Pengawasan Masa Kampanye Pemilu 2024 di Bali, Senin, 5 Februari 2024.

Persiapan tersebut untuk melakukan pembekalan terkait penertiban APK ke jajaran pengawas pemilu. Lolly juga menyerukan untuk melakukan patroli dalam masa tenang.

“Selain pembekalan, kita juga akan melakukan patroli dalam masa tenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu,” ungkap Lolly.

Selain itu, dia menjelaskan beberapa potensi pelanggaran pemilu dalam masa tenang yang harus diwaspadai pengawas pemilu.

“Adapun potensi pelanggaran pemilu yang harus kita waspadai, yaitu politik uang, kampanye dan sruvei yang dilakukan di masa tenang,” ungkap Lolly.

Diketahui, masa tenang Pemilu 2024 diatur dalam PKPU Nomor 3

Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam aturan tersebut, yang dimaksud masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu.

Harus Siaga

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta seluruh ketua Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tidak tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang menyatakan mengenai kepemimpinan atau keanggotaan dalam partai politik.

“Jika ada yang masuk atau tercantum dalam Sipol, maka harus segera ambil tindakan. Jika ada penyelenggara yang memiliki SK pengurus, maka harus dihentikan,” kata Bagja dalam Konsolidasi Nasional Persiapan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu 2024 di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Bagja mengatakan, jika ada jajaran penyelenggara yang namanya dicatut, bisa mengajukan keberatan. Mekanismenya sesuai dengan penanganan pelanggaran. Setelah itu, nama yang bersangkutan harus segera dibersihkan karena tahapan pencoblosan semakin dekat.

“Tolong dibersihkan (apabila terbukti pencatutan nama dalam Sipol). Jangan jadi masalah karena sudah ada yang menjadi korban. Kita harapkan para ketua (Bawaslu daerah) memastikan hal ini dengan melakukan koordinasi bersama koordinator divisi SDM,” tuturnya.

Menjelang akhir masa kampanye, Bagja juga memerintahkan seluruh jajaran untuk siaga. Biasanya, Bagja mengaku, dalam rapat akbar disusupi dengan acara bagi-bagi bantuan sosial, bagi-bagi uang dan semacamnya, sehingga harus melakukan patroli agar hal tersebut tidak terjadi.

“Masa tenang menjadi masa yang tidak tenang bagi Bawaslu. Dalam masa tersebut dikhawatirkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Di sinilah peran Bawaslu untuk mencegah hal-hal yang dilarang oleh undang-undang,” ungkapnya. ●RDO





“Terlalu sering pelanggaran etik terjadi dan jika tidak bisa membenahi moral, integritas dan mengembalikan kepercayaan publik maka lebih baik mundur”

Neni Nur Hayati

INFO  
KPU

Minggu I • Februari 2024

23

# KETUA KPU HARUS MUNDUR

**Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.**

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P H Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Ketua DKPP, Hedy Lugo, mengatakan, pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pilpres 2024.

Menurutnya, vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk murni soal kode etik. Sehingga, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan juga. Ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu,” kata Hedy, Senin, 5 Februari 2024.

Dia mengatakan vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya, putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

“Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja,” tuturnya.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengaku tidak akan mengomentari putusan DKPP soal pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pemilu 2024.

Hasyim menuturkan selama persidangan pihaknya telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, hingga argumentasi, terkait pengaduan tersebut.

“Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan,” ucap Hasyim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Hasyim menyampaikan, secara konstruksi Undang-Undang Pemilu selalu menempatkan KPU sebagai posisi “ter”, yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dalam pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, kata Hasyim, pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Oleh karena itu, KPU tidak akan mengomentari apa pun putusan dari DKPP karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan.

“Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan,” ujarnya.

Capres nomor urut 01, Anies Baswedan, mengatakan, putusan DKPP menjadi peringatan bagi pimpinan dan anggota KPU untuk tidak lagi melakukan pelanggaran etik.

“Saya sudah sampaikan kemarin, saya apresiasi kepada DKPP yang sudah berani mengungkap yang nyata-nyatanya dan ini sekaligus juga pengingat atau alarm. Sembilan hari lagi pemilu, jangan sampai nanti pada hari pemilu dan setelah hari pemilu muncul masalah seperti ini lagi,” kata Anies di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 6 Februari 2024.

Man-tan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan putusan DKPP sudah tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Dia juga mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk tidak

lagi coba-coba melakukan pelanggaran.

“Jadi, ini peringatan bagi semua, jangan ada pelanggaran,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Anies, momentum ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak agar dapat mengoreksi peristiwa yang sedang terjadi dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.

“Banyak pihak sudah menyuarakan tentang dilucutnya demokrasi, direndahkan etika,” ucap Anies.

Mengenai kemungkinan Koalisi Perubahan maupun Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) bakal mengusulkan agar Ketua KPU Hasyim Asy'ari layak dipecat usai divonis DKPP, Anies secara eksplisit tidak menyinggung soal itu. Namun, Anies menegaskan ada pihak-pihak yang telah mencederai demokrasi.

“Kalau itu (pemecatan), kami tidak ada komentar. Tetapi, prinsipnya, kami becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak. Ini tinggal sembilan hari. Yuk ini jadi peringatan jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” katanya.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, meminta Hasyim Asy'ari menyadari pelanggaran etikanya. Neni meminta Hasyim tak perlu lagi melanjutkan tugasnya di KPU karena bisa menggerus kepercayaan publik terhadap KPU.

“Terlalu sering pelanggaran etik terjadi dan jika tidak bisa membenahi moral, integritas dan mengembalikan kepercayaan publik maka lebih baik mundur,” ujar Neni, Senin, 5 Februari 2024.

Neni khawatir akan ada spekulasi negatif dan rasa tidak percaya terhadap KPU akibat ulah Hasyim. “Publik tentu akan sangat khawatir ketika akan menuju

ke tahapan paling inti Pemilu 2024, tetapi tidak mampu juga menjadi contoh yang baik untuk KPU provinsi dan kabupaten/kota bahkan sampai tingkat adhoc,” ujar Neni.

Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) juga menyarankan Hasyim Asy'ari mundur dari jabatannya. Tingkah laku Ketua KPU yang telah berulang kali melanggar etik dan mendapatkan sanksi peringatan keras, dinilai telah nyata-nyata menafikan amanat konstitusi Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu harus memiliki sikap Jujur dan Adil.

“Bahwa pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota KPU lain dalam melakukan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan suatu tindakan pengabaian terhadap amanat Konstitusi dalam pelaksanaan Pemilu yang harus dilakukan secara berintegritas,” kata Peneliti PSHK FH UII, Muhammad Addi Fauzani.

PSHK FH UII juga mencatat bahwa putusan DKPP dalam memberikan sanksi ‘Peringatan Keras Terakhir’ kepada Ketua KPU terlihat sangat kompromistis dan mengabaikan prinsip keadilan Pemilu karena tidak sesuai dengan ketentuan sanksi Pasal 22 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP dalam peraturannya tersebut hanya mengatur mengenai sanksi: teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

“Terlebih terdapat fakta bahwa Ketua KPU telah dijatuhi paling tidak 3 kali sanksi peringatan keras,” ucap Addi.

PSHK FH UII menganggap pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu juga berimplikasi menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan Pemilu 2024 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LuberJurdil). Berdasarkan sejumlah catatan tersebut PSHK UII menyampaikan sejumlah rekomendasi.

“Kepada Ketua KPU RI sudah selayaknya mundur demi mengembalikan kepercayaan masyarakat akan Penyelenggara Pemilu yang Jujur dan Adil,” ungkapnya.

PSHK FH UII juga mengimbau kepada seluruh anggota KPU agar berbenah dan fokus dalam menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas.

“Kepada DKPP dalam memutus setiap dugaan pelanggaran etik mestinya berlandaskan pada hukum formil yang telah ditetapkan oleh DKPP sendiri sehingga tidak melahirkan putusan yang kompromistis yang mengabaikan prinsip Keadilan Pemilu,” kata dia. •RDO



"Kita belum sampai kepada level pemilih yang betul-betul rasional dan nampaknya ini ditangkap sebagai strategi elektoral oleh para calon presiden"

*Titi Anggraini*



# ANIES UNGGUL DEBAT GANJAR-PRABOWO KETAT

**Performa Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam debat capres terakhir, Minggu, 4 Februari 2024 menjadi sorotan publik. Berdasarkan survei Litbang Kompas, masing-masing kandidat memperoleh penilaian baik dari responden dengan skor lebih dari 7.**

Penilaian ini merujuk jawaban 68,7 persen dari responden yang menonton debat saat survei berlangsung. Rata-rata margin of error penelitian saat debat  $\pm 6,93$  persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei tersebut, publik menilai kemampuan ketiga capres menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, penguasaan masalah, serta penampilan kandidat di atas panggung. Penampilan pakaian, sikap, dan ekspresi yang ditunjukkan setiap capres juga masuk dalam penilaian publik.

Hasilnya, Anies Baswedan mendapatkan skor 7,5 dalam hal menjawab pertanyaan, 7,4 dalam penguasaan topik, dan 7,9 dalam penampilan di atas panggung. Rata-rata skor Anies dalam debat Pilpres 2024 kelima adalah 7,6.

Apabila dibandingkan dengan debat pertama dan ketiga, responden menilai Anies menunjukkan peningkatan. Sebelumnya, eks gubernur DKI Jakarta itu di-ganjar skor rata-rata 7,2 saat debat pertama dan 7,5 dalam debat ketiga.

Sementara itu, responden memberi Prabowo Subianto skor 7,0 dalam hal menjawab pertanyaan, 7,0 dalam penguasaan topik, dan 7,4 dalam penampilan di atas panggung. Skor rata-rata Prabowo dalam debat kali ini adalah 7,1.

Publik menilai Prabowo menunjukkan peningkatan saat tampil debat. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra itu diberi skor rata-rata 6,6 dalam debat pertama dan 7,0 dalam debat ketiga.

Selanjutnya, Ganjar Pranowo diberi skor 7,3 untuk kemampuan

menjawab pertanyaan, 7,4 untuk penguasaan topik, dan 7,4 untuk penampilan di atas panggung debat. Publik memberi Ganjar skor rata-rata 7,3.

Skor rata-rata Ganjar dalam debat Pilpres 2024 kelima sedikit menurun dibanding debat ketiga yang mencapai 7,5. Namun, eks gubernur Jawa Tengah itu mendapatkan penilaian lebih baik dibanding skor debat pertama 7,0.

Adapun tema debat capres terakhir atau debat Pilpres 2024 kelima adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Sebagian besar (88 persen) responden mengaku pilihan capresnya masih tetap sama seperti sebelum debat berlangsung. Pengakuan ini terlihat meningkat sedikit dibandingkan dengan debat keempat yang mempertemukan setiap cawapres.

Adapun Litbang Kompas mewawancarai sebanyak total 1.002 responden dari seluruh Indonesia pada lima kesempatan debat Pilpres 2024. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyayangkan pada Pilpres 2024 ini belum menumbuhkan pemilih rasional.

Alih-alih menawarkan gagasan atau program yang holistik, para capres justru terjebak dalam kampanye saling sindir, nyinyir hingga saling menjatuhkan.

"Kita belum sampai kepada level pemilih yang betul-betul rasional dan nampaknya ini ditangkap sebagai strategi elektoral oleh para calon presiden," kata Titi.

Pada sesi debat kelima capres, Titi menyebut tidak banyak program atau gagasan yang

bisa diterima secara holistik. Seperti saat menawarkan program penanganan stunting.

Ia menyayangkan tidak ada satupun capres yang mencegah perkawinan usia muda. Padahal untuk mencegah stunting, bisa dilakukan dengan menunda perkawinan usia muda.

Meski secara umum pada debat kelima ini, tampaknya para capres saling menahan diri. Namun tetap saja, politik stigma telah dipergunakan selama masa kampanye ini.

"Jadi nampaknya mereka akan mengadakan rally-rally kampanye akbar sampai 10 Februari dan menjangkau masa secara langsung. Sambil orang Indonesia itu enggak bisa lihat orang berantem. Jadi emosi itu yang mungkin nampaknya ingin dijaga. Stigma soal kok pemimpin yang itu jahat sih ya," ungkap dia.

Analisis politik dan Direktur Eksekutif, Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai debat terakhir Pilpres 2024 antiklimaks sebagai debat pamungkas yang ditunggu-tunggu oleh publik. Menurutnya, debat terakhir cenderung terlihat kalem, kering, dan datar.

Dalam debat tersebut memang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyinggung soal isu bansos.

Arifki menilai tampaknya debat tidak memanaskan karena tidak terjadi dialog atau debat yang bisa menjadi konten negatif. Satu-satunya yang bisa diambil dalam debat terakhir, kapitalisasi terhadap gagasan masing-masing capres.

"Tema debat terakhir Pilpres lebih ringan dibandingkan debat sebelumnya. Tetapi, para capres terlihat lebih berhati-hati menjalankan debat. Sepertinya, para capres lebih

menjaga konten yang keluar pasca debat. Apalagi pemilihan tinggal beberapa hari lagi," ujar Arifki, Senin, 5 Februari 2024.

Pada debat sebelumnya, debat antara Anies dan Prabowo lebih menarik perhatian publik. Arifki melihat pada debat terakhir debat tersebut terjadi antara Ganjar dan Prabowo. Hal ini terkait isu makan siang gratis dan internet gratis.

Sedangkan Anies lebih sering mengulas soal bansos. Komentar Anies ini terlihat lebih menyerang Jokowi dibandingkan Prabowo.

"Makanya, tidak terjadi debat panas antara Anies dan Prabowo didebat terakhir, karena isu yang dilempar Anies lebih kepada positioning politiknya dengan pemerintahan Jokowi," ujarnya.

"Debat terakhir memang sedikit mengecewakan pendukung Paslon yang fanatik, karena tidak ada bahan atau konten yang terlalu menyerang. Terpenting, pada debat terakhir ini kita melihat tiga Paslon lebih fokus pada gagasan yang mereka tawarkan untuk menarik hati pemilih," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai, debat terakhir antar capres kurang menggali hal-hal substansial saat membahas tema teknologi informasi.

Menurut Heru, debat terakhir tidak seperti yang diharapkan dan cenderung main aman. Terutama dalam kaitan menggali strategi membangun ekosistem teknologi informasi selama lima tahun ke depan.

Pembahasan soal manufaktur telekomunikasi misalnya. Amat disayangkan, lantaran isu teknologi informasi sangat luas kemudian dipersempit jadi isu manufaktur.

"Padahal kita bisa bicara tentang bagaimana kedaulatan teknologi informasi secara keseluruhan. Bagaimana kedaulatan digitalnya, bagaimana keamanan siber, termasuk pemerataan akses internet, kemudian banyak hal termasuk soal artificial intelligence yang memang harusnya bisa menyentuh hal-hal seperti itu," terang Heru.

Heru justru heran yang menjadi perdebatan soal makan siang gratis atau internet gratis. Padahal, kedua isu tersebut tidak bisa dibandingkan.

"Sekarang kalau kita bicara kebutuhan pokok, internet juga menjadi kebutuhan pokok," ujar Heru.

Seharusnya pembahasan lebih mendalam seperti bagaimana mewujudkan internet yang merata di Indonesia. Kemudian juga terkait kecepatan internet Indonesia yang masih rendah hingga keamanan siber yang rentan.

●RDO

